

LAPORAN KINERJA

2023



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama tahun 2023. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian *output* dan *outcome*.



Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2024

Deputy Director of Maritime and Energy Coordination



Jodi Mahardi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023.

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023). Ketiga Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tersebut dibagi dalam 4 Perspektif, yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*.

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SS.1 yang memiliki 3 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1) **Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan realisasi sebesar 113,5% dengan target 100%**; 2). **Kedaulatan Maritim dengan realisasi sebesar 78,30% dengan target 70% yang dikonversikan menjadi nilai 3 (Berdaulat)**; dan 3). **Efektivitas Diplomasi Maritim dengan realisasi sebesar 75,80% dengan target 70%.**

Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan 4 Perspektif Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian
Stakeholders Perspective						Ultimate Outcome					
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1. Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70%	76,66	125%	SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1. Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5	113,50%
		2. Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%	99,86	143%			2. Indeks Kedaulatan Maritim	70	78,30	111,86%
SS.2	Terwujudnya Ketahanan energi nasional	3. Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)	7,19	100%			3. Efektivitas Diplomasi Maritim	70	75,30	107,57%
Customer Perspective						Immediate Outcome					
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4. Persentase Inisiasi Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%	82,60	127%	SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4. Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%	92,08	142%			5. Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6. Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%	82,06	137%	Intermediate Outcome					
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7. Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%	88,14	147%	SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6. Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	N/A
SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	8. Tingkat Ketahanan Energ	Tahan (6-7,99)	7,19	120%			7. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79%



Internal Business Process Perspectiv						100%	Output	100%*
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energ	9. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100,00	100%		Jumlah Target Output pada Renja 2023 18 Rekomendasi Kebijakan 2 Layanan Kesekretariatan 4 Dokumen Perencanaan 16 Dokumen Pelaporan	100%
Learning and Growth Perspective						103,7%		
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	10. Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%	88,89	105%			
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11. Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	70,14	100%			
		12. Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80	90,14	113%			
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energ	13. Nilai IKPA pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75	73,00	83,73%			



Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: **4) Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, dimana rekomendasi terdiri dari 5 koordinasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 antara lain;** a). Rekomendasi dari Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; b). Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; c). Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) d). Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim; e). Rekomendasi Peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas.

Prestasi Koordinasi Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 adalah menghasilkan Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.

Prestasi Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) menghasilkan **Pertama**, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (*Arctiipeiagic and Island States*) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023. **Kedua**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Senior Official Meeting* (SOM) ke 7 AIS Forum di Suva – Republik Fiji pada tanggal 7 Juni 2023 yang berhasil meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS Forum; **Ketiga**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Ministerial Meeting* (MM) ke 5 AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 30 Negara dan 3 Organisasi Internasional menghasilkan kesepakatan disepakati untuk memperkuat komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama AIS Forum di masa mendatang; **Keempat**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *1st High Level Meeting* (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri 32 Negara dan 4 Organisasi Internasional berhasil menghimpun partisipasi dari berbagai stakeholder terutama dari para pemuda pemudi di negara-negara AIS Forum.



Sedangkan Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 untuk IKU 5). **Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, dengan realisasi sebesar 100%, dimana Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan terdiri dari 3 Isu Strategis yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 antara lain; a). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional melalui Koordinasi Penurunan harga gas di Indonesia; b). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi melalui 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Kilang Existing (*Refinery Development Master Plan* /RDMP) dan Pembangunan Kilang Baru/Grass Root Refinery (GRR); dan c). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 12 tempat.**

Prestasi Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menghasilkan percepatan peresmian operasi PSEL Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2023.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: **6) Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan realisasi sebesar masih menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 90,14%, dikarenakan perubahan mekanisme penilaian PMRB berubah menjadi RB Tematik. Pelaksanaan RB Tematik Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 melalui 3 tema untuk melaksanakan koordinasi yang langsung menyentuh masyarakat, yakni: A). Pengentasan Kemiskinan dengan 1 kegiatan koordinasi; B) Peningkatan Investasi dengan 5 kegiatan koordinasi;; C) Percepatan Prioritas Aktual Presiden dengan 7 kegiatan koordinasi.**

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk IKU 7) **Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 75,45% dengan target sebesar 72%, yang melebihi target Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023.**

SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menghasilkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 dengan realisasi sebesar 64,85, tahun 2021 dengan realisasi sebesar 67,53%, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 70,14 dan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 75,45% atau tingkat akuntabilitas kinerja BB dengan interpretasi Sangat Baik. Sehingga Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan

Maritim dan Energi Tahun 2022 dan Tahun 2023 berdasarkan Target Renstra dan Target RPJMN adalah sebagai berikut..

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Target RPJMN/Nasional	
		Target	Realisasi		Realisasi		2023	2024
Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5	113,50 %	70,19%	100%	N/A*	N/A*
	Indeks Kedaulatan Maritim	70% ≈ 3 (Berdaulat)	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	111,86 %	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	70% ≈ 3 (Berdaulat)	N/A*	N/A*
	Efektivitas Diplomasi Maritim	70%	76,65%	107,57 %	75,80%	70%	N/A*	N/A*
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	100%	90,14**	95	N/A*	N/A*
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79 %	70,14	N/A***	N/A*	N/A*

*) N/A (Not Aavailable) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

**) Hasil tahun 2022

***) tidak ada target pada dokumen Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Capaian Kinerja Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 mencapai Rp. 68.159.125.725,- (99,87%) dari total Anggaran



sebesar Rp. 68.244.583.000,-. Sedangkan Efisiensi Anggaran pada Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar Rp.50.020.000.000,- dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi-koordinasi yang diluar perencanaan Rencana Aksi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023.

Capaian Kinerja lainnya tahun 2023 yang Pertama dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah **Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS)**. Kerja sama tersebut menghasilkan prestasi melalui penandatanganan MOU antara Indonesia dengan beberapa negara di benua Afrika pada tahun 2023. 1). MOU antara Indonesia-Kenya menghasilkan 16 MOU; 2). MOU antara Indonesia-Afrika Selatan menghasilkan 4 MOU; 3). MOU antara Indonesia-Tanzania menghasilkan 7 MOU; 4). MOU antara Indonesia-Mozambik menghasilkan 8 MOU. Anggaran belanja tambahan yang diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 untuk **Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS)** adalah sebesar Rp 2.920.995.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.912.270.932,- atau sebanyak 99,70%.

Capaian Kinerja lainnya tahun 2023 yang Kedua dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah **Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini**. Peningkatan Kerja Sama Bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, diantaranya adalah sebagai berikut: Klaster Hilirisasi; Klaster Kelistrikan; Klaster Pendidikan; Klaster Konektivitas; dan Klaster Infrastruktur. Anggaran belanja tambahan yang telah diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk **Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini** adalah sebesar Rp. 2.700.305.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.656.926.522,- atau sebesar 98,39 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	1
1.3. Peran Strategis	5
1.4. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.4. Pengukuran Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	24
3.2. <i>Ultimate Outcome</i> (SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien).....	28
3.2.1. <i>IKU 1: Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi</i>	29
3.2.2. <i>IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim</i>	32
3.2.3. <i>IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim</i>	39
3.3. <i>Intermediate Outcome</i> (SS.2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi).....	40
3.3.1. <i>IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti</i>	41
3.3.1.1 <i>Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025</i>	42
3.3.1.2 <i>Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	44
3.3.1.3 <i>Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)</i>	45
3.3.1.4 <i>Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim</i>	49
3.3.1.5 <i>Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas</i>	51

3.3.2. <i>IKU 5: Persentase Isu-isu Strategis yang Diselesaikan</i>	55
3.3.2.1 <i>Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional</i>	56
3.3.2.2. <i>Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi</i>	58
3.3.2.3. <i>Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)</i>	61
3.4. <i>Immediate Outcome (SS.3. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi)</i>	64
3.4.1. <i>IKU 6: Presentase Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</i>	65
3.4.2. <i>IKU 7: Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</i>	68
3.5. <i>Capaian Kinerja Lainnya</i>	72
3.5.1. <i>Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang</i>	72
3.5.2. <i>Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini</i>	78
3.6. <i>Analisa Keuangan</i>	85
3.7. <i>Efisiensi Anggaran</i>	91
3.8. <i>EAnalisa Sumber Daya</i>	92
3.8.1. <i>Pegawai</i>	92
3.8.2. <i>Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)</i>	97
BAB IV PENUTUP	98
4.1. <i>Kesimpulan</i>	98
4.2. <i>Prestasi/success story</i>	102
4.3. <i>Kendala</i>	103
4.4. <i>Tindak Lanjut</i>	109
LAMPIRAN.....	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran atau target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2023 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun 2024 dalam substansi yang terkait.

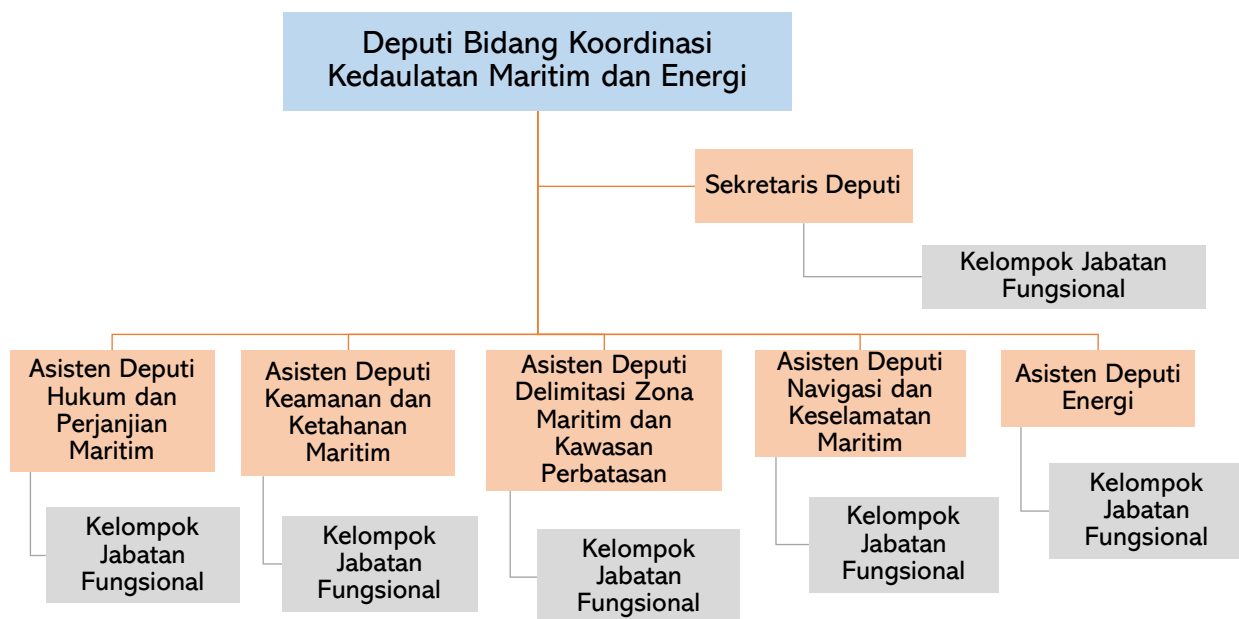
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersaji pada gambar dan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputy; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputy; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputy
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

	keamanan dan ketahanan maritim	bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan



		c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi

1.3. Peran Strategis

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama periode jangka menengah. Agenda pembangunan kemaritiman dan investasi tahun 2020-2024 khususnya pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yaitu Teguhnya Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

Pelaksanaan tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui peran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Tujuan peran strategis tersebut adalah



terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global dan terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan peran strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kedaulatan maritim dan energi, maka Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi fokus pada 5 program prioritas yaitu bidang



hukum dan perjanjian maritim, bidang keamanan dan ketahanan maritim, bidang kewilayahan maritim, bidang keselamatan maritim dan bidang ketahanan energi.

1.4. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai tahun 2023 total berjumlah 63 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 55 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 8 orang. Jumlah PNS yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang. Sedangkan jumlah TKK yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang.

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi			
1	Ruang Kantor	31	ruang
Kendaraan bermotor			
1	Roda 2	1	unit
2	Roda 4	3	unit
Inventaris Liannya			
1	Alat Computer/Computer unit	178	unit
2	Alat Elektronik Rumah Tangga	13	unit
3	Alat Kantor	18	unit

**sumber Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Desember 2023*

Sumber Daya Keuangan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 berdasarkan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dengan total pagu sebesar Rp. 63.200.000.000,- dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp2.030.000.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp2.020.000.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp2.040.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp52.030.000.000
5	Koordinasi Energi	Rp2.050.000.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp830.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp2.200.000.000
Jumlah Anggaran		Rp 63.200.000.000

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Realisasi kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diuraikan realisasi kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan..



Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja tahun 2023, kegiatan tahun 2023 penghitungan pencapaian IKU unit kerja, Data dukung lainnya terhadap pencapaian IKU.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 1 (satu) dari 4 (empat) tujuan pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan investasi tahun 2020-2024 khususnya pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yaitu Teguhnya Jati Diri Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

Oleh karena itu visi Tahun 2020-2024 Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi adalah mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim
2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia
3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia
		4	Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia
		5	Meningkatnya Kemandirian dan ketahanan energi

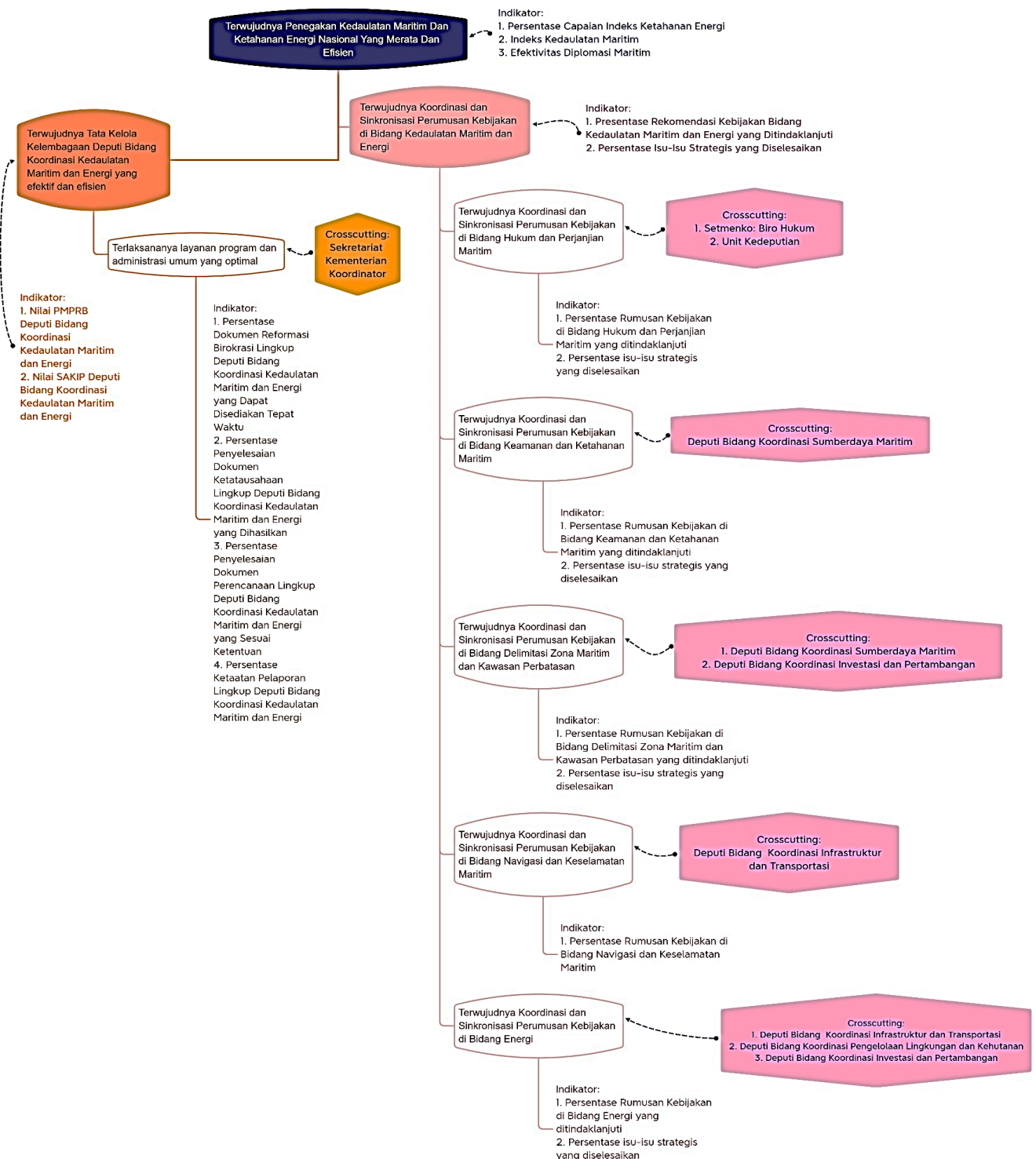
Memperhatikan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020 dan 2021, bahwa rendahnya tingkat kendali Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terhadap beberapa IKU serta rendahnya kontinuitas ketersediaan data untuk beberapa IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi perlu dilakukan penajaman. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah melakukan reviu Renstra untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Reviu dilakukan sampai pada level Eselon II.

Hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya.

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan mencari cara untuk meningkatkannya Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.1. Peta Cascading Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi





Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terbagi ke dalam 3 (tiga) leveling outcome, yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Kinerja tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk masing-masing *leveling outcome* dengan 1 (satu) sasaran. *Ultimate outcome* melalui 1 (satu) sasaran strategis, *Immediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran strategis; serta *Intermediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2022-2023

2022					Target Rrenstra 2024	2023					Target Rrenstra 2024
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET		NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
Stakeholders Perspective						Ultimate Outcome					
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70	79	SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	70%
		2	Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%	70%			2	Indeks Kedaulatan Maritim	70	79
SS.2	Terwujudnya Ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)	Tahan (6-7,99)			3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70	76
Customer Perspective						Immediate Outcome					
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	4	Persentase Inisiasi Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%	70%	SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Martim dan Energi	4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	70%
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	5	Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%	60%			5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	6	Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%	60%						
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia	7	Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%	50%						



SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	8	Tingkat Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)	Tahan (6-7,99)						
Internal Business Process Perspective							Intermediate Outcome				
SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energ	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjut	100%	100%	SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	95
								7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	100%
Learning and Growth Perspective							Output				
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	10	Persentase SDM Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%	100%		Jumlah Target Output pada Renja 2023 • 18 Rekomendasi Kebijakan • 2 Layanan Kesekretariatan 4 Dokumen Perencanaan 16 Dokumen Pelaporan		100%		
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	11	Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	100%						
		12	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80	95						
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	13	Nilai IKPA pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75							



2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 5 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim
2. Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim
3. Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim
4. Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim
5. Koordinasi Energi.

Penyusunan anggaran tahun 2023, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA. 2023 telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA-120.01.1.350494/2022 dimana Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp 63.200.000.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan blokir anggaran. Blokir anggaran dilakukan karena rencana kerja tidak dilengkapi dengan dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Adapun blokir sebesar Rp 9.887.674.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.621.300,- (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga jumlah anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 sebesar Rp68.821.300.000,- (Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian anggaran per program sebagai berikut.

Tabel 2.2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Sampai Akhir Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp2.030.000.000
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp2.020.000.000
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Maritim	Rp2.040.000.000
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp52.030.000.000
5	Koordinasi Energi	Rp2.050.000.000
6	Kebijakan Pengendalian Isu Strategis	Rp830.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp2.200.000.000
8	ABT Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS)	Rp2.920.995.000
9	ABT Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini	Rp2.700.305.000
Jumlah Anggaran		Rp68.821.300.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi maka menghasilkan perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023, sebagai alat untuk mengukur kinerja ke deputian selama satu tahun. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kedaulatan Maritim	70	Tahunan
	Efektivitas Diplomasi Maritim	70	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	Tahunan
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	Tahunan

Adapun Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Rincian Data Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja/Output Kinerja	Target				
			2023	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	-	-	-	100%
2	Indeks Kedaulatan Maritim	Indeks Kedaulatan Maritim	70	-	-	-	70
3	Indeks Diplomasi Maritim	Efektivitas Diplomasi Maritim	70	-	-	-	70
4	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	1. Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	100%	25%	50%	75%	100%
		2. Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100%	25%	50%	75%	100%
		3. Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	100%	25%	50%	75%	100%
		4. Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	100%	25%	50%	75%	100%
		5. Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	100%	25%	50%	75%	100%
5	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	1. Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional	100%	25%	50%	75%	100%
		2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi	100%	25%	50%	75%	100%
		3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	100%	25%	50%	75%	100%
6	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	-	-	-	90
7	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	-	-	-	72

Sedangkan Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.4. Matriks Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7.7	Inderect	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	Tahunan
	Indeks Kepemimpinan Maritim	≥ 3	Inderect		Indeks Kedaulatan Maritim	70	Tahunan
					Efektivitas Diplomasi Maritim	70	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemandirian dan Investasi yang Efektif dan Efisien	Presentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	Direct	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	Tahunan
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Direct		Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	Inderect	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	Tahunan

Sumber. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

2.4. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun anggaran 2023 akan dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia.

Berdasarkan hasil reviu Renstra sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 dan 2021, maka mempengaruhi perubahan formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen **Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Formulasi pada dokumen manual IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, berdasarkan Buku Manual: Kepemimpinan Maritim (2023), seperti pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Cover Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim



Level Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi :

Indikator Kinerja 1:

Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penggunaan energi yang ramah lingkungan (acceptability), dan ketersediaan energi (availability). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat



pemanfaatan energi dan lingkungan hidup. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dihitung menggunakan formula.

$$\text{Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi} = \frac{\text{Indeks Ketahanan Energi}}{\text{Target Indeks Ketahanan Energi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 2:

Indeks Kedaulatan Maritim

Indeks ini menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim. Indeks Kedaulatan Maritim dihitung menggunakan formula.

$$IKedM = W_{ISM}I_{ISM} + W_{IWM}I_{IWM} + W_{IAM}I_{IAM}$$

Keterangan:

W_{ISM} : bobot untuk variable keselamatan maritim

I_{ISM} : nilai skor untuk variable keselamatan maritim

W_{IWM} : bobot untuk variable kewilayahan maritim

I_{IWM} : nilai skor untuk variable kewilayahan maritim

W_{IAM} : bobot untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

I_{IAM} : nilai skor untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{ISM} , W_{IWM} , dan W_{IAM} secara berurutan yakni 11, 24, dan 65.

Indikator Kinerja 3:

Indeks Efektivitas Diplomasi Maritim

Indikator ini menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Indeks diplomasi maritim tersusun dari dua variabel, dengan menggunakan formula.

$$IDiplomMar = W_{IDia}I_{IDia} + W_{IMisi}I_{IMisi}$$

Keterangan:

W_{IDia} : bobot untuk variabel dialog

I_{IDia} : nilai skor untuk variabel dialog

W_{IMisi} : bobot untuk variabel misi

I_{IWM} : nilai skor untuk variabel misi

Adapun nilai bobot untuk W_{IDia} dan W_{IMisi} yakni 39 dan 61.

Indikator Kinerja 4:

Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi terukur dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan menggunakan formula.

$$\text{Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L}}{\text{Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 5:

Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelaksanaan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi. Capaian Indikator Kinerja 5 terukur dari jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target yang ditetapkan dalam rencana aksi.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}} \times 100\%$$



Indikator Kinerja 6:

Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).

Indikator Kinerja 7:

Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan *logical framework* yang sebelumnya menggunakan *Balanced Scorecard*.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023. Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023), dijelaskan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Target RPJMN/Nasional	
		Target	Realisasi		Realisasi		2023	2024
Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5	113,50 %	70,19%	100%	N/A*	N/A*
	Indeks Kedaulatan Maritim	70% ≈ 3 (Berdaulat)	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	111,86 %	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	70% ≈ 3 (Berdaulat)	N/A*	N/A*
	Efektivitas Diplomasi Maritim	70%	76,65%	107,57 %	75,80%	70%	N/A*	N/A*
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	N/A*	N/A*
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	100%	90,14**	95	N/A*	N/A*
	Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79 %	70,14	N/A***	N/A*	N/A*

Sumber. Laporan Hasil Perhitungan Indeks Kepemimpinan Maritim tahun 2023

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

**) Hasil tahun 2022

**) tidak ada target pada dokumen Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Oleh karena itu Analisa Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 yang didasarkan pada capaian kinerja dan pembobotan pada masing-masing perspektif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini

Tabel 3.2. Analisa Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2022 dan Tahun 2023 berdasarkan pendekatan perspektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			
			Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian	
Stakeholders Perspective						120%			Ultimate Outcome			110,97 %
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	2. Tingkat Kedaulatan Maritim Indonesia	70%	76,66	125%	SS.1	Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien	3. Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100%	113,5	113,50%	
		4. Persentase Inisiasi Indonesia yang Diusulkan dan/atau Diterima di Forum Internasional	70%	99,86	143%			5. Indeks Kedaulatan Maritim	70	78,30	111,86%	
SS.2	Terwujudnya Ketahanan energi nasional	6. Indeks Ketahanan Energi	Tahan (6-7,99)	7,19	100%			3. Efektivitas Diplomasi Maritim	70	75,30	107,57%	
Customer Perspective						120%			Immediate Outcome			100%
SS.3	Meningkatnya Peran Aktif dalam Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim untuk Menjaga Kedaulatan Maritim	7. Persentase Inisiasi Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim	65%	82,60	127%	SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	4.Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
SS.4	Terwujudnya Keamanan dan Ketahanan Maritim Indonesia	14. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	65%	92,08	142%			5. Presentase Isu-lsu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	
SS.5	Terwujudnya Kepastian Hukum Wilayah Indonesia dan Terjaganya Kepentingan Indonesia	15. Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia	60%	82,06	137%	Intermediate Outcome					104,79%	
		SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	6.Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	90,14**	N/A					
SS.6	Terwujudnya Keselamatan Maritim Indonesia			16. Tingkat Keselamatan Maritim di Indonesia	60%	88,14	147%	7.Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79%	
SS.7	Meningkatnya Ketahanan Energi	17. Tingkat Ketahanan Energ	Tahan (6-7,99)	7,19	120%	Output					100%*	
Internal Business Process Perspectiv						100%						



SS.8	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energ	18. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100,00	100%	Jumlah Target Output pada Renja 2023 • 18 Rekomendasi Kebijakan • 2 Layanan Kesekretariatan • 4 Dokumen Perencanaan • 16 Dokumen Pelaporan	100%
<i>Learning and Growth Perspective</i>					103,7%		
SS.9	Tersedianya SDM yang Kompeten	19. Persentase SDM Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	85%	88,89	105%		
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	20. Nilai Evaluasi Internal SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	70,14	100%		
		21. Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	80	90,14	113%		
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energ	22. Nilai IKPA pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	75	73,00	83,73%		

****) capaian tahun 2022**

Sehingga capaian kinerja total Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 melalui pendekatan perspektif dapat dilihat pada Tabel 3.3. dibawah ini.

*Tabel 3.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Bobot
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023*

Perspektif	Capaian	Bobot	Capaian Total
<i>Ultimate Outcome</i>	110,97 %	0,4	105.35 %*
<i>Intermediate Outcome</i>	100%	0,3	
<i>Immediate Outcome</i>	104,79%	0,2	
<i>Output</i>	100%	0,1	

**) Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspektif*

3.2. *Ultimate Outcome* (SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien)

Ultimate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis pertama (SS.1) pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi , yang terdiri dari tiga IKU, yaitu Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi, Indeks Kedaulatan Maritim dan Efektivitas Diplomasi Maritim. Perspektif *Ultimate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,4. Capaian *Ultimate Outcome* pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Ultimate Outcome Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

Perspektif	Capaian	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	110,97 %	0,4

Sedangkan Capaian Kinerja *Ultimate Outcome* Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Ultimate Outcome Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2023*		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	100	113,5	113,5%
2	Indeks Kedaulatan Maritim	70	78,30	111,86%
3	Efektivitas Diplomasi Maritim	70	75,30	107,57%

Defenisi SS.1 adalah suatu kondisi yang menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur kedaulatan maritim dan ketahanan energi. Unsur kedaulatan maritim yang terdiri dari aspek kewilayahan, keamanan dan ketahanan maritim, dan keselamatan maritim. Sedangkan unsur ketahanan energi terdiri atas aspek terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Adapun capaian kinerja SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja SS.1 Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien dari tahun 2020 sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	6-7,99	7,04	7,19	7,18	100%	113,5 %	100%
Kedaulatan Maritim	70	62,10 % ≈ 3 (Berdaulat)	70,50 % ≈ 3 (Berdaulat)	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	70	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	79
Efektivitas Diplomasi Maritim	70	60,70%	61,54%	76,65%	70	75,80	76

3.2.1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi

Defenisi Indikator ketahanan energi digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional. Masing-masing indikator dipilih berdasarkan aspek 4A yaitu kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi diperoleh berdasarkan Nilai Indeks Ketahanan Energi dibagi Target Indeks Ketahanan Energi dan dikali seratus persen, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi} = \frac{\text{Indeks Ketahanan Energi}}{\text{Target Indeks Ketahanan Energi}} \times 100\%$$

Adapun perbandingan persentase capaian indeks ketahanan energi dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi Dari Tahun 2020 Sampai 2023

Uraian	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi	6-7,99	7,04	7,19	7,18	100%	113,5 %	100%

Sedangkan **Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi** adalah sebesar **113,5%**. Angka tersebut didapat dari nilai Indeks Ketahanan Energi yakni sebesar 82,05 dibagi dengan target Indeks Ketahanan Energi yang telah ditetapkan yakni sebesar 72,29. Pengukuran indeks ketahanan energi (**sumber data Asisten Deputi Energi**), dengan perincian sebagai berikut.

Indeks Ketahanan Energi = availability (40,65%) + accesstability (26,12%) + affordability (19,10%) + acceptability (14,13%)

$$= 88,37 (40,65\%) + 59,14 (26,12\%) + 98,10 (19,10\%) + 84,57 (14,13\%)$$

$$= 35,92 + 15,45 + 18,74 + 11,95 = \underline{\underline{82,05}}$$

Yang didapat dari perhitungan sebagai berikut.

a. Availability = diversifikasi energi primer (43,25%) + Kondisi Penyediaan Energi Fosil (28,08%) + Potensi EBT (40,61%)

$$= 36,40 + 14,07 + 37,90 = 88,37$$

b. Accessibility = Kehandalan Infrastruktur BBM (13,09%) + Kehandalan Infrastruktur Gas (14,41%) + Kehandalan Infrastruktur LPG (10,51%) + Kehandalan Infrastruktur Listrik (25,72%) + Optimalisasi Pemanfaatan Batubara (8,82%) + Penyiapan Infrastruktur EBT (27,47%)

$$= 11,10 + 11,38 + 5,97 + 20,76 + 2,42 + 7,51 = 59,14$$

c. Affordability = Efisiensi penggunaan Energi (33,06%) + Produktivitas Energi Sektor (23,46%) + Harga BBM (12,49%) + Harga LPG (11,63%) + Harga Listrik (19,35%)

$$= 31,17 + 23,46 + 12,49 + 11,63 + 19,35 = 98,10$$

d. Acceptability = Emisi GRK (14,13%) = 84,57 (14,13%) = 11,95

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung SS 1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7. dibawah ini.

Tabel 3.8. kegiatan-kegiatan yang mendukung SS 1. IKU 1. Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi tahun 2023 pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	1	Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Migas Dan Hilirisasi Industri Migas
		2	Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas
		3	Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR))
		4	Koordinasi penerbitan regulasi dalam rangka penurunan emisi GRK sektor migas
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	5	Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 12 Kota,
		6	Koordinasi Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
		7	Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Pembangkit EBT dan Investasi di Sektor EBT (1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla; 2. Grand Launching 6 Perusahaan End-to-End Industri Solar PV di Kawasan Industri (KI) Wiwawaja, Batam; dan 3. PLTS Terapung Cirata)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional	8	Koordinasi Pencapaian Rasio Elektrifikasi di Indonesia
		9	Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketanagalistrikan melalui tiga sektor yakni, pembangkitan, transmisi, dan pembangunan gardu induk

3.2.2. IKU 2: Indeks Kedaulatan Maritim

Defenisi Indeks Kedaulatan Maritim merupakan Indeks pertama dalam penyusunan Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indeks Kedaulatan Maritim menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam memastikan kewilayahan baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat serta kemampuan dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim serta keselamatan maritim, dengan formula sebagai berikut.

$$IKedM = W_{ISM}I_{ISM} + W_{IWM}I_{IWM} + W_{IAM}I_{IAM}$$

Keterangan:

W_{ISM} : bobot untuk variable keselamatan maritim

I_{ISM} : nilai skor untuk variable keselamatan maritim

W_{IWM} : bobot untuk variable kewilayahan maritim

I_{IWM} : nilai skor untuk variable kewilayahan maritim

W_{IAM} : bobot untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

I_{IAM} : nilai skor untuk variable keamanan dan ketahanan maritim

Adapun nilai bobot untuk W_{ISM} , W_{IWM} , dan W_{IAM} secara berurutan yakni 11, 24, dan 65.

Adapun perbandingan capaian Nilai Indeks Kedaulatan Maritim dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Capaian Nilai Indeks Kedaulatan Maritim Dari Tahun 2020 Sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Kedaulatan Maritim	70	62,10 % ≈ 3 (Berdaulat)	70,50 % ≈ 3 (Berdaulat)	76,66 % ≈ 3 (Berdaulat)	70	78,30 % ≈ 3 (Berdaulat)	79

Capaian Indeks Kedaulatan Maritim berdasarkan penjumlahan antara Variabel Keselamatan Maritim, Variabel Kewilayahan Maritim serta Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim. Indikator pada variable Kewilayahan adalah Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan, Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional, Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim, Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun. Indikator pada variable Keamanan dan Ketahanan Maritim adalah Indeks Keamanan Laut dan Tingkat Kendali Koordinasi

Keamanan dan Ketahanan Maritim. Sedangkan Indikator pada variable Keselamatan Maritim adalah Tingkat Keselamatan Maritim.

➤ Kewilayahan Maritim

Variabel kewilayahan maritim tersusun atas 4 indikator utama yakni: 1) persentase posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional (**sumber data Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan**); 2) indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim (**sumber data Kementerian Luar Negeri**); 3) realisasi jumlah dokumen kesepakatan teknis batas negara di laut yang tersusun (**sumber data dari Badan Informasi Geospasial**); 4) presentasi zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan (**sumber data Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan**), dengan capaian variabel kewilayahan maritim adalah **84,74** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.9. Perincian Nilai Variabel Kewilayahan Maritim Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Skala 100	Bobot x Nilai
Kewilayahan	24,0%		84,74	84,74
Persentase Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan	25%	94	94,00	23,50
Persentase Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir di dalam Regulasi Perairan dan Dasar Laut Internasional	25%	94	94,00	23,50
Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	25%	50,96	50,96	12,74
Realisasi Jumlah Dokumen Kesepakatan Teknis Batas Negara di Laut yang Tersusun	25%	4/4	100,00	25,00

➤ Keselamatan Maritim

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim (**sumber data Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim**). Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu, keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat Keselamatan Maritim diukur dalam rentang nilai 0 s.d. 100 persen dengan formula sebagai berikut.

$$KM = \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3}$$

dimana:

KM = Tingkat Keselamatan Maritim

%B1 = Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran | $0\% \leq \%B1 \leq 100\%$

%B2 = Tingkat Keselamatan Aktivitas Pelayaran | $0\% \leq \%B2 \leq 100\%$

%B3 = Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim | $0\% \leq \%B3 \leq 100\%$

Pada akhir Desember 2023, diperoleh angka Tingkat Keandalan Sarana bantu Navigasi Pelayaran sebesar 93,19 persen (**sumber data dari Kementerian Perhubungan**), angka Tingkat Keselamatan Maritim sebesar 99,98 persen (87 jumlah kecelakaan dari 432.013 jumlah pelayaran), dan angka Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim sebesar 90 persen (20 kasus yang ditangani Mahkamah Pelayaran, dan 18 kasus yang sudah mendapat amar putusan). Dengan demikian angka Tingkat Keselamatan Maritim dihitung sebesar:

$$KM = \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3} = \frac{93,19 + 99,98 + 90}{3} = \frac{283,17\%}{3} = \mathbf{94,39\%}$$

Capaian variabel keselamatan maritim adalah 94,39 sebagaimana tabel 3.8. berikut

Tabel 3.8. Perincian Nilai Variabel Keselamatan Maritim Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Skala 100	Bobot x Nilai
Keselamatan Maritim	11,0%		94,39	94,39
Tingkat Keselamatan Maritim	100,0%	94,39	94,39	94,39

➤ **Keamanan dan Ketahanan Maritim**

Variabel ini tersusun dari dua indikator utama, yakni: 1) tingkat keamanan dan ketahanan maritim (**sumber data Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim**) dan 2) indeks keamanan laut (**sumber data Badan Keamanan Laut**). Adapun capaian keamanan dan ketahanan maritim adalah sebesar **73,21** (tabel 3.9.) sebagai berikut.

Tabel 3.9. Perincian Nilai Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Skala 100	Bobot x Nilai
Keamanan dan Ketahanan Maritim	65,0%			73,21
Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	50%	90,41	90,41	45,21
Indeks Keamanan Laut	50%	56	56,00	28,00

Berdasarkan data-data di atas, perolehan nilai Indeks Kedaulatan Maritim (IKdM) sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perincian Nilai Variabel Keamanan dan Ketahanan Maritim Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Bobot x Nilai
Kedaulatan Maritim			78,30
Keamanan dan Ketahanan Maritim	65,0%	73,21	47,58
Kewilayahan	24,0%	84,74	20,34
Keselamatan Maritim	11,0%	94,39	10,38

$$\text{IKdM} = 24\% \text{ Kw} + 11\% \text{ Ks} + 65\% \text{ Ka} = 24\% (84,74) + 11\% (94,39) + 65\% (73,21) \\ = 78,30\% \approx 3 \text{ (Berdaulat)}$$

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 80$	3	Berdaulat
$x > 80$	4	Sangat Berdaulat

Adapun Keiatan-Kegiatan yang Mendukung SS 1. IKU 2. Indeks Kedaulatan Maritim pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dilaksanakan oleh empat unit kerja eselon II dalam Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebagai berikut.

Tabel 3.11. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim yang Mendukung SS 1. IKU 2. Indeks Kedaulatan Maritim pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan/	
Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	1	Koordinasi Gap Analysis Peraturan Perundang-Undangan Maritim
		2	Koordinasi Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Maritim Nasional maupun Adopsi Peraturan Internasional
		3	Koordinasi Gap Analysis serta melakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan maritim nasional maupun adopsi aturan Internasional secara parallel.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	4	Koordinasi Penguatan Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman melalui Kerja Sama Indonesia dengan beberapa Negara (Belanda, Kanada, Papua Nugini) serta organisasi kemaritiman.
		5	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Komitmen Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Kemaritiman

	Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	6	Koordinasi dan Optimalisasi Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk melalui Kepmenko dalam rangka asistensi percepatan pelaksanaan dan pelaporan implementasi Renaksi KKI
		7	Koordinasi dan Sosialisasi secara Berkala Kepada Kementerian Dan Lembaga Dalam Rangka Optimalisasi Pelaporan Renaksi KKI

Tabel 3.12. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim yang Mendukung SS 1. IKU 2. Indeks Kedaulatan Maritim pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	1	Koordinasi Peningkatan Pengembangan Platform Inter-operabilitas antar K/L, sarana komunikasi dan koordinasi yang efektif antar puskodal/command center K/L.
		2	Koordinasi Penerapan berbagai regulasi peraturan perundang-undangan turunan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
		3	Koordinasi Penyusunan dan Penyampaian Peraturan Nasional/Internasional terkait Underwater Unmanned Vehicle (UUV).
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	4	Koordinasi Peningkatkan Pemahaman Personil Pemerintah dan Masyarakat dengan Program-Program Pengembangan Kapasitas terkait Blue Finance Accelerator.
		5	Koordinasi Penjajakan Kerjasama untuk Penanganan Sampah dan Pencemaran di Laut serta Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Maritim.
	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	6	Koordinasi Pengidentifikasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk menyusun program berbasis keahlian, peningkatan kapasitas baik SDM maupun kelembagaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur strategis dan penunjang untuk memaksimalkan potensi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci (WP3K)
		7	Koordinasi Penguatan Keamanan di WP3K
		8	Koordinasi Peningkatan Kesadaran tentang Pengelolaan Sumber Daya yang berkelanjutan

	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	9	Koordinasi Percepatan Ratifikasi Konvensi ILO C-188 dengan Membentuk Tim Percepatan Ratifikasi.
		10	Koordinasi secara Massive Layanan Pengaduan Pelaut Awak Kapal Perikanan (PAKP) dengan memaksimalkan platform yang ada di Kemenko Marves maupun platform yang ada di K/L lain
		11	Koordinasi Percepatan Terbitnya Turunan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Tabel 3.13. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan yang Mendukung SS 1. IKU 2. Indeks Kedaulatan Maritim pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi	1	Koordinasi Peran aktif pemerintah Indonesia di forum internasional yang membahas seputar isu penamaan rupabumi (toponim) sekaligus melakukan monitoring jumlah pulau di Indonesia sebagai bentuk validasi dan verifikasi updating data terkini berdasar amanat angka acuan jumlah pulau yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 1996
		2	Koordinasi penyusunan payung hukum untuk program kerja sama yang bersifat teknis untuk implementasi sinergi penyelenggaraan data dan informasi kelautan dalam rangka pembangunan nasional
		3	Mendorong pembentukan roadmap nasional penyelenggaraan data batimetri dan implementasi integrasi data batimetri ke dalam Sistem Nasional melalui sinergi Timnas
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan	4	Mendorong Percepatan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan 10 Indonesia Melalui Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024
		5	Koordinasi Percepatan Pemberlakuan Secara Simultan Persetujuan FIR 2022, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2007, dan Perjanjian Ekstradisi 2022 Pada Semester 1 Tahun 2024
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi	6	Koordinasi Perluasan landas kontinen di luar 200 NM (tindak lanjut submisi di area selatan Jawa dan Nusa Tenggara)

	Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	7	Koordinasi Pengelolaan laut bebas (perundingan dan adopsi perjanjian perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya genetik di area di luar wilayah yurisdiksi nasional–BBNJ)
		8	Koordinasi Percepatan peran aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	9	Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan dan Posisi Pemerintah Indonesia Sebagai Inisiator Utama dan Penggerak Utama AIS Forum tetapi tetap Secara Inklusif Melibatkan Negara-Negara Partisipan Lainnya

Tabel 3.14. Kegiatan-Kegiatan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim yang Mendukung SS 1. IKU 2. Indeks Kedaulatan Maritim pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Indikator Kinerja Utama	Rincian Output (RO)	Kegiatan	
Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	1	Koordinasi pengajuan proposal revisi aturan Sistem Pelaporan Kapal di Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk Peningkatan Keamanan dan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Maritim.
		2	Koordinasi Pengelolaan Limbah dan Dampak Lingkungan Kegiatan Penutupan Kapal Di Wilayah Indonesia.
		3	Koordinasi Pengembangan Potensi Bisnis Maritim di Selat Sunda.
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim	4	Koordinasi Pembongkaran (Decommissioning) Anjungan Minyak dan Gas Tidak Terpakaidi Perairan Indonesia
		5	Koordinasi Penetapan Alur Pelayaran Dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kenavigasian dan Keselamatan Pelayaran di Danau Toba
		6	Koordinasi Peningkatan Standar Kelayakan dan Kelaiklautan Kapal Non-Konvensi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan <i>Risk Assessment</i> Daerah Rawan Kecelakaan	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penetapan dokumen analisis risiko (<i>risk assessment</i>) segmen laut selat Makassar merupakan kelanjutan dari analisis resiko terhadap perairan rawa nkecelakaan transportasi laut di Indonesia
		8	Koordinasi Penyusunan Dokumen <i>risk assessment</i> segmen laut Selat Makassar
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan dan	9	Koordinasi Percepatan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Penerapan Sistem

	Kesehatan Kerja Bidang Maritim		Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) pada Industri Galangan Kapal
--	--------------------------------	--	--

3.2.3. IKU 3: Efektivitas Diplomasi Maritim

Defenisi Indeks Efektivitas Diplomasi Maritim merupakan Indeks kedua dalam penyusunan Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Indikator Efektivitas Diplomasi Maritim menggambarkan keberhasilan peran aktif Indonesia dalam memastikan kedaulatan maritim. Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional, dengan formula sebagai berikut.

$$IDiplomMar = W_{IDia}I_{IDia} + W_{IMisi}I_{IMisi}$$

Keterangan:

W_{IDia} : bobot untuk variabel dialog

I_{IDia} : nilai skor untuk variabel dialog

W_{IMisi} : bobot untuk variabel misi

I_{IWM} : nilai skor untuk variabel misi

Adapun nilai bobot untuk W_{IDia} dan W_{IMisi} yakni 39 dan 61.

Adapun perbandingan capaian Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim dari tahun 2020 sampai 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Efektivitas Diplomasi Maritim	70	60,70%	61,54%	76,65%	70	75,80	76

Capaian Indikator Diplomasi Maritim berdasarkan dari dua variabel yakni **Variabel Dialog** dan **Variabel Misi**. Indikator pada variabel Dialog adalah Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (**sumber data Kementerian Luar Negeri**), sedangkan Indikator pada variabel Misi (**sumber data Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim**) adalah Pertama, Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Kedua, Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional Bidang Kemaritiman.

Adapun perincian capaian Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim dari tahun 2023 adalah sebagai berikut.

➤ Variabel Dialog

Adapun capaian variabel dialog tahun 2023 adalah sebesar 81,40 yang dapat dilihat secara terperinci pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Capaian Variabel Dialog Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Skala 100	Bobot x Nilai
Dialog	39,0%		81,40	31,75
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	100,0%	4,07/5	81,40	81,40

➤ Variabel Misi

Adapun Nilai Variabel Misi tahun 2023 adalah sebesar 72,22, (Tabel 3.17).

Tabel 3.17. Capaian Variabel Misi Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Skala 100	Bobot x Nilai
Misi	61,0%		72,22	44,06
Diterimanya Inisiatif dan Posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional	50,0%	100	100,00	50,00
Penempatan Wakil Indonesia di Organisasi Internasional	50,0%	4/9	44,44	22,22

Berdasarkan Nilai Variabel Dialog dan Variabel Misi maka perolehan nilai **Efektivitas Diplomasi Maritim (EDM)** sebagai berikut.

Tabel 3.18. Capaian nilai Efektivitas Diplomasi Maritim (EDM) Tahun 2023

Uraian	Bobot	Nilai Dasar	Bobot x Nilai
Diplomasi Maritim			75,80
Dialog	39,0%	81,40	31,75
Misi	61,0%	72,22	44,06

$$\text{Nilai EDM} = 39\% \text{ Dialog} + 61\% \text{ Misi} = 39\% (81,40) + 61\% (72,22) = 75,80\%$$

3.3. *Intermediate Outcome* (SS.2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi)

Intermediate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis kedua pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, yang terdiri dari dua IKU, yaitu Pertama, Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim

dan Energi yang Ditindaklanjuti. Kedua, Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan. Perspektif *Intermediate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,3. Capaian *intermediate Outcome* pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Capaian Intermediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

Perspektif	Capaian	Bobot
<i>Intermediate Outcome</i>	100%	0,3

Defenisi Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi merupakan Seluruh rumusan kebijakan Isu-Isu Strategis di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dihasilkan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sedangkan Capaian Kinerja *intermediate Outcome* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja intermediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2023*		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%
<i>Intermediate Outcome</i>				100%

3.3.1. IKU 4: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti

IKU 4 adalah Tingkat pelaksanaan gagasan/saran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi tentang suatu isu guna mengakselerasi capaian target yang telah ditentukan, dengan formula sebagai berikut.

Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti =

Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti oleh K/L
Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang disampaikan ke K/L x 100%

Defenisi Tingkat capaian Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah tingkat yang tersusun berdasarkan Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan ke Menko dan dikalikan seratus persen. Tujuan pengukuran Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti adalah Untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi dalam hal koordinasi, sinkronisasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan energi dengan melihat banyaknya rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

IKU Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti merupakan capaian dari beberapa Rancangan Kebijakan sebagai berikut:

3.3.1.1 Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025

Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dalam rangka pelaksanaan Perpres No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Perpres No 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Hal ini merupakan langkah progresif yang digunakan dalam percepatan pembangunan di bidang kemaritiman (Visi Poros Maritim Dunia). Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain: 1). Koordinasi dan Optimalisasi Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk melalui Kepmenko dalam rangka asistensi percepatan pelaksanaan dan pelaporan implementasi Renaksi KKI; 2). Koordinasi dan Sosialisasi



secara Berkala Kepada Kementerian Dan Lembaga Dalam Rangka Optimalisasi Pelaporan Renaksi KKI.

Target dalam rekomendasi kebijakan ini adalah Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025.

Kendala Rancangan Kebijakan ini di tahun 2023 adalah **pertama**, Belum maksimalnya tingkat kepatuhan pengumpulan pelaporan dari Masing-masing K/L melalui aplikasi SISMONEV 2.0; **Kendala kedua**, Adanya Perubahan Rencana Kegiatan pada pertengahan tahun 2023.

Pengaruh Sumber Daya dalam rekomendasi kebijakan ini adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 113/D1 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Renaksi KKI Tahun 2021-2025 (sebagai tim taskforce pemantauan ditingkat internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional).

Verifikasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Pada Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) melalui 5 tahapan pemanfaatan Sismonev Renaksi KKI, yang dimulai dengan penyusunan dan penajaman F8K, dilanjutkan dengan penginputan pada SISMONEV 2.0, pelaporan capaian target melalui SISMONEV 2.0, verifikasi capaian target melalui SISMONEV 2.0, dan diakhiri dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan teknis verifikasi dilaksanakan oleh masing-masing K/L dengan tim verifikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri dari Kelompok kerja 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; Kelompok kerja 2 : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim; Kelompok kerja 3 : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kelompok kerja 4 : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan; Kelompok kerja 5 : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kelompok kerja 6 : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta; Kelompok kerja 7 : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Proses monitoring dan evaluasi renaksi KKI dilakukan pada B06, B09 dan B12 di tahun 2023 melalui Aplikasi Sismonev 2.0 yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden. Dalam implementasinya terdapat pergantian fungsionaris K/L saat proses monitoring dan evaluasi renaksi KKI sehingga menyebabkan adanya ketidakselarasan informasi terhadap laporan yang diberikan dalam hal ini masih perlu dilakukan perbaikan. Terdapat kegiatan pendalaman dan penajaman mengenai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam KKI, yaitu Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini adalah melakukan akselerasi oleh masing-masing POKJA internal di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong K/L untuk memastikan target – target Tahun 2024 dapat selesai di akhir Tahun untuk dilaporkan di B12 pada awal 2025.

Success story dalam rekomendasi kebijakan ini adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 113/D1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.

Rekomendasi dari Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 pada tahun 2023 adalah Melakukan optimalisasi Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk melalui Kepmenko dalam rangka asistensi percepatan pelaksanaan dan pelaporan implementasi Renaksi KKI.

3.3.1.2 Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, ditetapkan oleh Presiden pada Februari 2022 berisikan tentang lanjutan Program Kegiatan Tahap Ke-2 Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025. Salah satu visi Kebijakan Kelautan Indonesia Rencana Aksi Tahun 2021-2025 adalah Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata. Oleh karena itu **Target Rancangan Kebijakan ini** koordinasi peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.



Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain: 1). Koordinasi Pengidentifikasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk menyusun program berbasis keahlian, peningkatan kapasitas baik SDM maupun kelembagaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur strategis dan penunjang untuk memaksimalkan potensi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci (WP3K); 2). Koordinasi Penguatan Keamanan di WP3K; 3). Koordinasi Peningkatan Kesadaran tentang Pengelolaan Sumber Daya yang berkelanjutan.

Kendala Rancangan Kebijakan ini di tahun 2023 adalah 1). Belum maksimalnya program-program untuk pemberdayaan baik wilayah dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga perlu untuk menyusun program yang membangun serta mengembangkan potensi wilayah dan masyarakat agar WP3K tidak sangat ketergantungan dengan pulau utama; 2). Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar-pulau menghambat respons cepat terhadap bencana dan mempersulit upaya evakuasi, bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut; 3). aspek mahal teknologi dan biaya aplikasi dan pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas teknologi menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini adalah Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim telah mengidentifikasi dengan HIMBARA, NAM Center, Perancis, dan Denmark untuk melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas di WP3K untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah mengidentifikasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk menyusun program berbasis keahlian, peningkatan kapasitas baik SDM maupun kelembagaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur strategis dan penunjang untuk memaksimalkan potensi WP3K.

3.3.1.3 Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) adalah dari *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum yang merupakan bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Target **Rancangan Kebijakan ini** adalah sebagai sebuah wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan sedunia yang bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi permasalahan global dengan empat area utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. KTT AIS Forum diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global. *Ministerial Meeting* (MM) ke 4 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2022 menyepakati untuk diselenggarakannya Pertemuan Tingkat Kepala Negara/ Pemerintahan Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*High Level Meeting* (HLM) AIS Forum pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan kegiatan pendukung yaitu Koordinasi dan Konsolidasi Kebijakan dan Posisi Pemerintah Indonesia Sebagai Inisiator Utama dan Penggerak Utama AIS Forum tetapi tetap Secara Inklusif Melibatkan Negara-Negara Partisipan Lainnya. Koordinasi dan Konsolidasi melalui beberapa kegiatan antara lain: 1).

Penyelenggaraan SOM-7 di Suva pada tanggal 7 Juni 2023 di Suva – Republik Fiji dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara AIS (daftar negara terlampir) dan 5 Organisasi



Internasional. SOM-7 ini adalah pertemuan pertama AIS Forum yang diadakan di luar Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS Forum. Kesuksesan penyelenggaraan SOM-7 kemudian diikuti oleh penyelenggaraan SOM-8 di Antananarivo, Madagaskar. SOM-8 dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Madagaskar (H.E. Yvte Sylla) dan ditutup oleh Menteri Perikanan dan Ekonomi Biru Madagaskar (H.E. Dr. Paubert Mahatante). Pertemuan membahas berbagai program AIS Forum, dengan agenda khusus membahas persiapan penyelenggaraan dan dokumen luaran 1st *High Level Meeting* (HLM) AIS Forum yang akan diadakan di Bali-Indonesia pada 11 Oktober 2023; 2). Pada tanggal 10 Oktober 2023, Pemerintah Indonesia menggelar Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum yang diikuti oleh 30 negara partisipan dan 3 Organisasi Internasional. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia tersebut berhasil menyepakati rancangan

final Leaders' Declaration yang kemudian diajukan untuk diadopsi oleh para pemimpin negara pulau dan kepulauan. Penyelenggaraan KTT Pertama AIS Forum telah sukses diselenggarakan oleh Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023. KTT yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center dihadiri oleh total 32 negara partisipan dan 4 organisasi internasional, termasuk 7 VVIP.

Gambar 3.4. 1st High Level Meeting (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023



Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Energi 2023

3). *Ministerial Meeting* (MM) ke 5 AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2023 menghasilkan kesepakatan disepakati untuk memperkuat komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama AIS Forum di masa mendatang Sedangkan 1st *High Level Meeting* (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 juga telah berhasil menghimpun partisipasi dari berbagai stakeholder terutama dari para pemuda pemudi di negara-negara AIS Forum.

Sumber Daya Rancangan Kebijakan ini yakni AIS Forum beranggotakan 47 yang terdiri dari 22 Negara Kepulauan, adalah sebagai berikut: Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Cabo Verde, Comoros, Cuba, Cyprus, Dominica, Dominica Republic, Fiji, Federated States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesia, Ireland, Jamaica, dan Japan. serta 26 Negara Pulau (Kiribati, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and The Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Solomon Islands, Sri Lanka, Suriname, Timor Leste, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Tonga, United Kingdom, dan Vanuatu). 26 Negara tersebut



ada yang tergabung dalam perwakilan organisasi internasional dari Kawasan Pasifik yakni *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Island Development Forum* (PIDF). Partisipasi aktif negara dari kawasan Pasifik, dan kehadiran MSG serta PIDF bermakna strategis bagi Upaya soft diplomacy Indonesia meredam tantangan terhadap keutuhan teritorial Indonesia di Papua.

Kendala Rancangan Kebijakan ini di tahun 2023 adalah Pertama, Berdasarkan hasil mandat dari High-Level Meeting, Pemerintah Indonesia dinilai kurang berinisiasi dengan Sekretariat AIS Forum untuk menyusun rancangan awal roadmap peningkatan kerangka institusional AIS Forum dalam rangka menuju pembentukan organisasi internasional. Oleh karena itu, Kemenko Marves sebagai penjuror utama AIS Forum di Indonesia agar segera mengoordinasikan berbagai K/L terkait dalam penyusunan dimaksud. **Kedua**, Meskipun keterlibatan K/L pada AIS Forum sudah maksimal, namun sangat dibutuhkan keterlibatan potensi peran aktif BUMN pada AIS Forum sangat minim, padahal selain sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia, keterlibatan BUMN bisa membantu mendapatkan pasar baru di berbagai negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. **Ketiga**, Melanjutkan komitmen pendanaan Indonesia untuk AIS Forum seperti yang telah disampaikan oleh Presiden pada saat HLM AIS Forum.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini adalah sebagai berikut, 1). Rencana pelaksanaan dua kali *Senior Official Meeting* (SOM) dan satu kali *Ministerial Meeting* (MM) AIS Forum di tahun 2024; 2). Penyusunan rancangan roadmap untuk 3 tahun mendatang berfokus untuk persiapan institusional AIS Forum menjadi Organisasi berbasis Traktat/Charter. Dengan 3 aspek utama yakni Dewan Penasehat, *Program and Operation Policy and Procedure* (POPP/SOP), dan Kerangka Kelembagaan; 3). Regulasi Nasional guna mengawal leadership Indonesia untuk menjadikan AIS Forum sebagai Organisasi Internasional; 4). Rencana pembentukan Working Group Nasional dan Working Group AIS Forum untuk strategi nasional dan roadmap AIS Forum; 5). Komitmen pendanaan Pemerintah Indonesia atas kontribusi sukarela non-regular senilai 5 Juta USD yang akan memasuki termin kedua (2024-2025), dan terkait hal tersebut Kemenko Marves telah siapkan rencana pencairan anggaran untuk tahun 2024.

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) tahun 2023 adalah Menyiapkan Kebijakan dan Posisi Pemerintah Indonesia Sebagai Inisiator Utama dan Penggerak Utama AIS Forum tetapi tetap Secara Inklusif Melibatkan Negara-Negara Partisipan Lainnya.



Success story Rancangan Kebijakan ini adalah **Pertama**, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (*Arcfiipeiagic and Island States*) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023. **Kedua**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Senior Official Meeting* (SOM) ke 7 AIS Forum di Suva – Republik Fiji pada tanggal 7 Juni 2023 yang berhasil meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS Forum; **Ketiga**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Ministerial Meeting* (MM) ke 5 AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 30 Negara dan 3 Organisasi Internasional menghasilkan kesepakatan disepakati untuk memperkuat komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama AIS Forum di masa mendatang; **Keempat**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *1st High Level Meeting* (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri 32 Negara dan 4 Organisasi Internasional berhasil menghimpun partisipasi dari berbagai stakeholder terutama dari para pemuda pemudi di negara-negara AIS Forum.

3.3.1.4 Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim

Dasar pelaksanaan Rancangan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim adalah Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan Upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun Rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Maka dikeluarkan peraturan terkait hal tersebut diatas adalah Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan



bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 maka Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, maka **Target Rancangan Kebijakan ini adalah Penerapan SMK-3** mengacu pada standar yang telah ada di Internasional dan Nasional dengan prinsip penyesuaian pada industri galangan kapal berdasarkan penilaian tingkat resiko pada industri tersebut sehingga menurunkan Insiden kecelakaan kerja di galangan kapal. Insiden kecelakaan kerja di galangan kapal di Indonesia semakin meningkat tiap tahun, dan sudah memakan korban jiwa yang tinggi. Oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan arahan dari Presiden untuk konsen dalam masalah kesehatan dan keselamatan kerja di galangan kapal sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan di galangan kapal, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan kegiatan pendukung yaitu Koordinasi Percepatan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK-3) pada Industri Galangan Kapal.

Pengaruh Sumber Daya

Kendala Rancangan Kebijakan ini di tahun 2023 adalah Pertama, Hasil evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan SMK-3 yang sudah diatur secara jelas oleh PP nomor 50 tahun 2012 pada galangan kapal, menghasilkan bahwa diperlukan perubahan revisi terhadap peraturan tersebut. Hal ini disebabkan industri galangan kapal memiliki tiga jenis yakni, industri galangan kapal kecil, sedang dan menengah. **Kedua,** Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Industri Maritim yang diusulkan kementerian perindustrian pada tahun 2023, masih dalam proses persetujuan pada Proklam Legislasi Nasional (Prolegnas), membuat keterlambatan dalam penyempurnaan dokumen SMK-3 pada PP nomor 50 tahun 2012 yang akan direvisi.

Sumber Daya Rancangan Kebijakan ini yakni, Aspek Implementasi SMK-3 adalah: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan Procurement, Administrasi, Sarana dan Prasarana, Penanganan Darurat, Penanganan Limbah B-3 dan Keamanan. Indonesia



memiliki 127 industri komponen kapal dan bahan baku kapal yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Sedangkan khusus galangan kapal Indonesia memiliki lebih dari 250 galangan yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kota/kabupaten. Sebanyak 120 Galangan tergabung kedalam IPERINDO. Pembangunan kapal baru dalam negeri didominasi oleh Instansi Pemerintahan dan BUMN. Hampir 80% merupakan industri galangan kapal dengan kategori skala kecil dan menengah dengan fasilitas produksi 50 DWT s/d 5.000 DW.

Tindak lanjut Rancangan Kebijakan ini adalah antara lain: 1). Mendorong pengembangan sektor industri perkapalan terutama dalam ketersediaan SDM industri perkapalan yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian; 2). Mendorong percepatan pegesahan rancangan PP tentang Industri Maritim; 3). Mendorong penyusunan Draft pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal pada PP nomor 50 tahun 2012.

Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim tahun 2023 adalah Penyempurnaan substansi pada Dokumen SMK-3 dilakukan secara berkelanjutan, sambil menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah mengenai Industri Maritim.

3.3.1.5 Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas

Dasar Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas adalah Minyak dan Gas merupakan sumber daya alam di Indonesia yang masih menjadi salah satu sumber energi andalan. Namun tidak sejalan dengan hal tersebut, kegiatan impor migas masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang saat ini belum bisa dipenuhi oleh industri migas dalam negeri. Sejak tahun 1995 produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta BOPD menjadi hanya 786 ribu BOPD pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014–2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%.

Target Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas adalah Adanya koordinasi dan dukungan terhadap instansi-instansi terkait dalam proses pencapaian produksi minyak 1 Juta barel per hari dan gas bumi 12 BSCFD serta 4 Juta Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga agar dapat terealisasinya target produksi migas untuk pemenuhan kebutuhan migas nasional dan tercapainya kemandirian energi nasional.

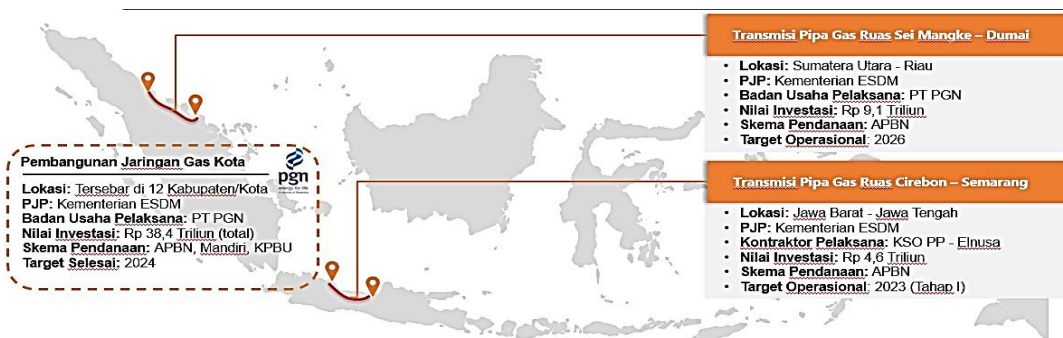
Sumber Daya Rancangan Kebijakan ini adalah Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebesar 54,83 TCF (per November 2023) yang dinyatakan proven, probable dan

possible (3 P) dari lapangan migas yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi hingga Papua. Total produksi gas bumi saat ini mencapai 5446,9 BBTUD dengan 68% pemanfaatan gas bumi dalam negeri sebesar 3725 BBTUD. Beberapa lapangan gas baru yang akan terus dikembangkan seperti, lapangan gas Abadi Blok Masela, lapangan gas Blok Andaman, lapangan gas Ubadari, dan lapangan gas potensial lainnya.

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan ini telah dilakukan kegiatan pendukung yaitu sebagai berikut: 1). Koordinasi Penerbitan Peta Jalan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Serta Hilirisasi Industri Minyak dan Gas; 2). Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas; 3). Koordinasi Capaian Akhir Pengembangan Kilang Eksisting (Refinery Development Master Plan (RDMP)) Dan Pembangunan Kilang Baru (Grass Root Refinery (GRR); 4). Koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas.

Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas selama tahun 2023, menunjukkan bahwa Jaringan gas: Proyek pembangunan dengan skema APBN dilakukan di 12 kabupaten/kota, sebanyak 40.777 Sambungan Rumah (SR), yang terbagi dalam 5 paket kegiatan. Secara keseluruhan, progres fisik proyek ini mencapai 48,08% dan realisasi keuangan sebesar 29,90%. Khususnya pada dua proyek yakni, Tansmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Dumai dan Tansmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang. Tansmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Dumai: Sedang dilakukan penyusunan Feasibility Study (FS) ulang untuk ruas Sei Mangkei – Dumai, sedangkan Tansmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang: Konstruksi Pipa Cisem Tahap I telah dimulai pada tahun 2022 untuk ruas Semarang-Batang. Progres keseluruhan per 1 Maret 2023 sudah mencapai 80,28% dari target rencana 79,12%. Proyek diharapkan bisa beroperasi secara bertahap pada akhir 2023.

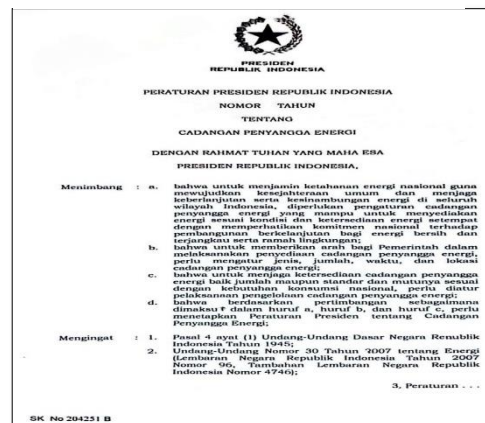
Gambar 3.5. Lokasi Tansmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Dumai dan Cirebon-Semarang



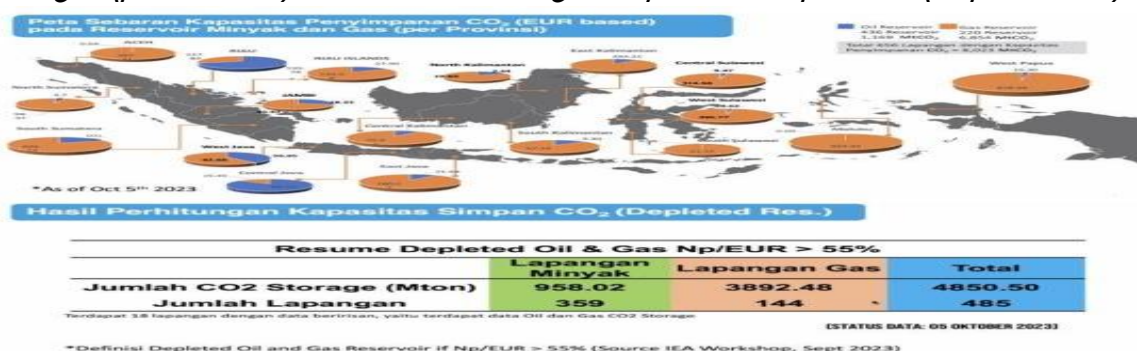
Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Asdep Energi 2023

Koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas, bertujuan untuk memberikan arah bagi Pemerintah dalam melaksanakan **penyediaan Cadangan penyangga energi**, perlu mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan penyangga energi. Ketersediaan Cadangan penyangga energi baik jumlah maupun standar dan mutunya sesuai dengan kebutuhan konsumsi nasional, perlu diatur pelaksanaan pengelolaan Cadangan penyangga energi (CPE) . Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Saat ini proses RPerpres CPE telah ditandatangani oleh Menko Marves (lampiran, Surat Menko kepada Mensekneg Hal. RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi) dan sedang menunggu proses di Sekretariat Negara. Terlampir RPerpres CPE (Gambar 3.5). Penyusunan RPerpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (CCS Hub) berfokus pada Pembangunan framework. Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang telah berlaku saat ini tidak ada isu dengan 3 sampai dengan 5 PoD on stream pada tahun 2026, serta ada 15 proyek CCS/CCUS ditargetkan on stream pada tahun 2030. Total kapasitas penyimpanan CO₂ dari 656 lapangan minyak dan gas di Indonesia sebesar 8023 MtCO₂ dengan sebaran 436 oil reservoir 1169 MtCO₂ dan 220 gas reservoir 6854 MtCO₂. Sebaran kapasitas penyimpanan CO₂ dihitung dengan metode EUR based dengan perhitungan depleted oil & gas Np/EUR. 55% (Gambar 3.7).

Gambar 3.6 Cover RPerpres CPE Tahun 2023



Gambar 3.7 Peta Sebaran Kapasitas Penyimpanan CO₂ (EUR based) pada Reservoir Migas (per Provinsi) dan Hasil Perhitungan Kapasitas Simpan CO₂ (Depleted Res)



Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Asdep Energi 2023



Kendala Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas selama tahun 2023, antara lain yaitu: 1). Tansmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Dumai mengalami kendala pada aspek keekonomian sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi *demand*; 2). Tansmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Duma tidak diajukan dalam perencanaan anggaran APBN tahun 2023 pada Kementerian Keuangan; 3). Tansmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang: Konstruksi Pipa Cisem Tahap I diharapkan bisa beroperasi secara bertahap pada akhir 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang; 4). Tansmisi Pipa Cisem Tahap II yaitu Ruas Batang Cirebon masih membutuhkan kepastian alokasi penganggaran proyek dari APBN oleh Kementerian Keuangan.

Kendala Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui Koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas, antara lain yaitu: 1). RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi) dan sedang menunggu proses di Sekretariat Negara; 2). Potensi penghasil emisi/emitters dalam dan luar negeri belum terpetakan; 3). Pemetaan potensi storage karbon belum terintegrasi antar K/L dan stakeholder terkait; 4). Belum ada standar penyelenggaraan kegiatan CCS secara nasional, dan direncanakan akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Presiden Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Lampiran, Surat Menko Hal. Arahan Presiden Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon).

Tindak Lanjut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mendorong peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas tahun 2024 adalah Inisiasi dan penyelesaian pipa transmisi Cirebon-Semarang, pipa transmisi Dumai-Sei Mangke, dan pipa transmisi WNTS-Pemping.

Sedangkan **Tindak Lanjut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mendorong peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas melalui koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas**, adalah 1). Mendorong Kementerian ESDM dalam pemetaan penghasil emisi/emitters dalam dan luar negeri; 2). Mendorong Kementerian ESDM dalam penyusunan peta potensi storage karbon untuk industri dalam negeri dan luar negeri melalui skema cross-border; 3). Berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sekretaris Negara dalam penyusunan kebijakan perizinan kegiatan usaha hulu migas melalui percepatan

pengesahan rancangan peraturan presiden tentang cadangan penyangga energi dan rancangan peraturan presiden penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; 4). Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Hulu Migas dalam mendukung penerapan Rancangan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Rekomendasi Peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas tahun 2023 adalah Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Hulu Migas.

3.3.2. IKU 5: Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan

Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, merupakan jumlah isu strategis (major project, janji presiden, dan proyek strategis nasional) di bidang kedaulatan maritim dan energi yang dapat diselesaikan sesuai target, dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Presentase Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan} = \frac{\text{Isu – isu Strategis yang diselesaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}}{\text{Isu – isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi}} \times 100\%$$

Defenisi Tingkat capaian persentase isu strategis yang diselesaikan berdasarkan jumlah isu strategis yang diselesaikan dibagi jumlah isu strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan dan dikali seratus persen. Tujuan Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan adalah untuk mengetahui jumlah isu strategis di bidang Kedaulatan maritim dan energi yang telah diselesaikan sesuai target. Capaian Kinerja Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	2020	2021	2022	Target 2023	2023	Target Renstra 2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi		Realisasi	
Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



IKU Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan merupakan capaian dari beberapa Isu-Isu Strategis sebagai berikut:

3.3.2.1 Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional

Dasar Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional adalah Peraturan Presiden No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

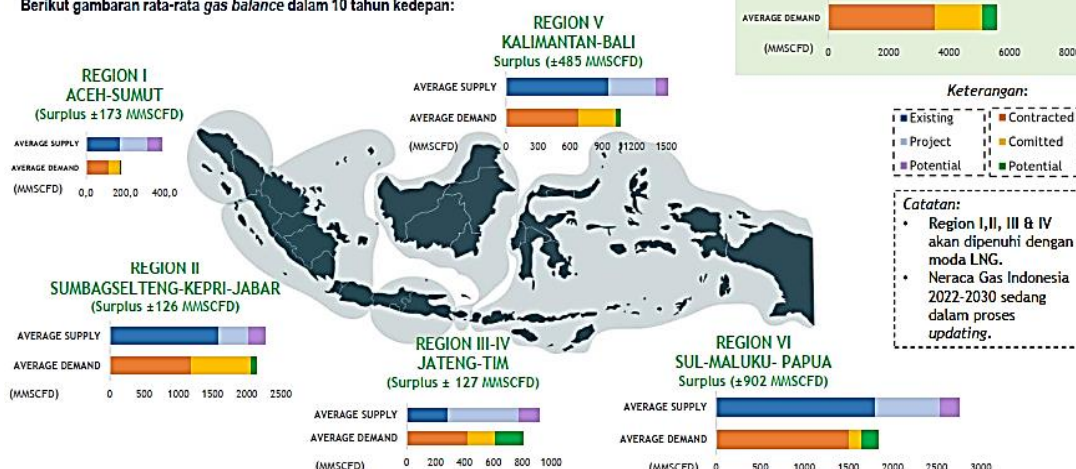
Sumber Daya Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional berdasarkan data Kementerian ESDM sepanjang tahun 2023, di sisi hulu migas, realisasi lifting minyak bumi mencapai 605,5 million barrels of oil per day (mbopd) dan lifting gas 960 million barrels of oil equivalent per day (mboepd). Optimalisasi lifting migas terus dilakukan sehingga decline minyak bumi berkurang menjadi hanya 1,2% pada tahun 2023 (rata-rata 3-4%), sementara lifting gas meningkat 2,2%. Sepanjang tahun 2023, industri hulu migas Indonesia turut mencatatkan sejarah baru dengan adanya penemuan besar atau giant discovery potensi gas bumi, diantaranya Layaran-1 Blok South Andaman dan Geng North-1 Blok North Ganal. Penemuan gas bumi ini sekaligus membantu pencapaian target tahun 2024, yaitu lifting minyak 635 mbopd dan lifting gas sebesar 1.033 mboepd. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, terobosan dilakukan melalui sejumlah pembangunan infrastruktur migas, yaitu Cirebon - Semarang hingga Tangguh Train 3 dengan penetapan toll fee yang lebih rendah untuk harga yang lebih terjangkau. Proyek Tangguh Train 3 ini dibangun dengan investasi sebesar USD 4,83 miliar atau setara 72,45 triliun rupiah. Dengan beroperasinya Tangguh Train 3, total produksi Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun atau sekitar 35% produksi nasional. Konversi energi primer ke gas dapat meningkatkan serapan gas dan efisiensi energi dalam negeri. Diperlukan strategi untuk menurunkan persentase ekspor LNG dan impor LPG serta pertumbuhan demand untuk meningkatkan serapan gas dalam negeri. Sedangkan keselarasan antara hulu, hilir, dan distribusi dapat dicapai dengan optimasi ekosistem gas nasional. Ekosistem Gas Nasional merupakan suatu sistem yang membentuk hubungan antara neraca gas, pasar, regulasi, harga gas, dan infrastruktur. Untuk itu diperlukannya strategi dalam menarik investor di sektor hulu migas untuk meningkatkan produksi dalam negeri (Gambar 3.8)

Gambar 3.8. Perencanaan Neraca Gas Indonesia 2022-2030

Neraca Gas Indonesia 2022-2030

Secara nasional, perkiraan kebutuhan gas Indonesia hingga tahun 2030 dapat dipenuhi dengan pemanfaatan *project* dan *potential supply*, serta mengoptimalkan peran LNG.

Berikut gambaran rata-rata gas balance dalam 10 tahun kedepan:



Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Asdep Energi 2023

Potensi cadangan gas konvensional (kategori P1) 36.3 TCF, sumber daya gas non-konvensional 46 TCF, dan potensi spekulatif gas non-konvensional 574 TCF (no 7 terbesar di dunia). Cadangan gas konvensional untuk selanjutnya dapat didukung dengan gas non-konvensional. Strategi pemenuhan supply gas bumi Indonesia dapat dicapai dengan menjaga produksi sumur eksisting, pengembangan cadangan menjadi produksi (R to P), dan peningkatan eksplorasi secara masif. Saat ini produk turunan gas bumi masih impor dalam memenuhi kebutuhan (soda ash, methanol, asetilena, dll). Pupuk Indonesia Grup menggunakan gas untuk menghasilkan produk terbatas pada amoniak dan produk turunannya. Pupuk Indonesia berencana memproduksi produk lainnya seperti methanol, soda ash, blue ammonia, dan produk turunan gas bumi lainnya. Indonesia berpotensi untuk diversifikasi bisnis dan mengurangi kebutuhan impor. Analisis nilai tambah industri (pupuk, ammonia, & metanol) dan pembangkit listrik. Industri dan Pembangkit Listrik Gas merupakan dua sektor yang memiliki nilai tambah berpotensi mendapatkan subsidi bila Indonesia menetapkan harga gas mengikuti harga pasar. Penggunaan gas bumi sebagai bahan baku dapat digambarkan dalam pohon nilai tambah industri kimia sebagai produk turunan yang menghasilkan nilai jual/ekonomi lebih tinggi. Peningkatan kapasitas industri methanol dan turunannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dan industri kimia dengan demand domestik 1,7 juta ton per tahun. Saat ini hanya ada 1 produsen di Indonesia kapasitas 660.000 ton per tahun.



Kendala dalam Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional pada tahun 2023 adalah 1). Ketidakselarasan supply dan demand gas bumi dengan belum terbangunnya integrasi pipa gas transmisi nasional; 2). Peningkatan kebutuhan gas bumi nasional meningkat namun supply gas nasional berkurang dan harga gas semakin meningkat; 3). Peta pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Jaringan Gas memerlukan evaluasi harga yang optimal dan strategi pengembangan infrastruktur massif. Optimasi lokasi, waktu dan harga antara produksi dan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur yg optimal.

Tindak Lanjut Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional melalui Koordinasi Penurunan harga gas di Indonesia pada tahun 2024 antara lain 1). Pengembangan dashboard dan database neraca gas nasional; 2). Pembentukan BUMN Petrokimia dan kebijakan sektor swasta petrokimia; 3). Penetapan harga pasar gas bumi dengan pemberian subsidi pada sektor bernilai tambah (methanol, pupuk, ammonia, dan pembangkit listrik); 4). Pemanfaatan advanced technology pada eksploitasi gas konvensional dan pengembangan skema bagi hasil lebih menarik pada gas non-konvensional; 5). Fleksibilitas bentuk kontrak kerja sama, perbaikan T&C pada penawaran Wilayah Kerja, pemberian fasilitas perpajakan dan rumusan insentif untuk mendorong iklim investasi di hulu; 6). Pengembangan infrastruktur dan perhitungan harga optimum implementasi Jargas, konversi sumber energi lain menjadi gas di sektor emisi tinggi, dan pengembangan kawasan industri berbasis gas bumi; 7). Penciptaan industri hilir baru dan diversifikasi badan usaha; 8). Alokasi kargo LNG Bontang dan Tangguh untuk mitigasi kekurangan pasokan gas bumi; 9). Optional untuk evaluasi pengalihan alokasi ekspor gas bumi secara bertahap dengan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik.

3.3.2.2. Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi

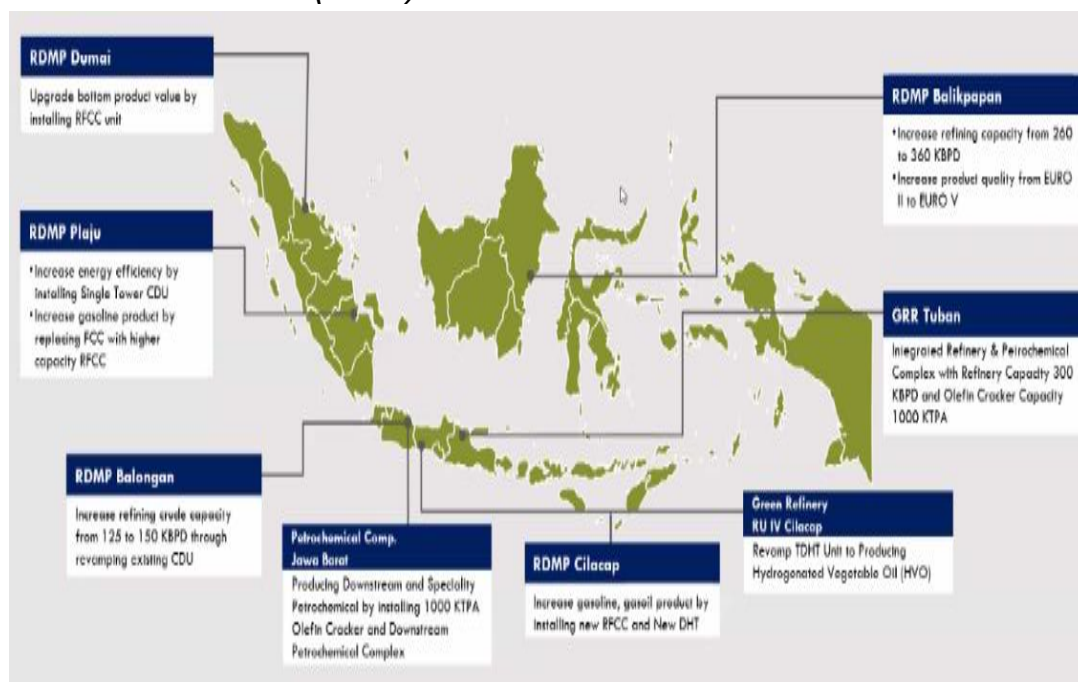
Dasar Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi ditahun 2023. Dalam rangka mendukung pencapaian Proyek Nasional (PN) tersebut, Direktorat Jenderal Migas memiliki dua **proyek prioritas strategis/Major Project (MP)** yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan salah satunya adalah **“Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat**

mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung terciptanya produk olahan lainnya”.

Target Pelaksanaa Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi tahun 2023 adalah 1). Terselesaikannya isu debottlenecking pengadaan lahan Kilang GRR Tuban; 2). Terlaksananya Operational acceptance RDMP Balongan; 3) Terlaksananya pre-commissioning Sistem Kelistrikan RDMP Balikpapan; 4). Dimulainya pekerjaan Site Development Kilang GRR Tuban; 5) Mempercepat Tangki Penyimpanan Lawe-lawe RDMP Balikpapan selesai dikerjakan.

Pelaksanaan perencanaan tersebut diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui beberapa program, salah satunya adalah Pengembangan Kilang Existing (RDMP) dan Pembangunan Kilang Baru/*Grass Root Refinery* (GRR). Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Kilang atau *Refinery Development Master Plan* (RDMP) terdiri atas 7 proyek yang tersebar di beberapa daerah antara lain RDMP Balongan, RDMP Balikpapan, RDMP Cilacap, GRR Tuban, Petrochemical Jawa Barat, RDMP Dumai, dan RDMP Plaju. Secara garis besar, tujuan PSN Kilang RDMP dan GRR ini adalah untuk menaikkan kapasitas produksi dari kilang existing dan meningkatkan kualitas produk hasil dari kilang. Detail tujuan dari masing-masing proyek RDMP terlampir pada gambar berikut.

Gambar 3.9. Pengembangan Kilang Existing/Refinery Development Master Plan (RDMP) di Indonesia



Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Asdep Energi 2023

Sedangkan progress capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang/RDMP hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.22. progress capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang/RDMP tahun 2023

Proyek	Nilai Proyek	Target On Stream	Progress	Real vs Plan (%)
GRR Tuban	US\$ 20.1 Bio	2028	Proses Keputusan Investasi Akhir (FID) dan lelang EPC/Kontraktor	7,36 vs 7,28
RDMP Balongan	US\$ 0.07 Bio	On Stream	On Stream	100
RDMP Balikpapan	US\$ 7.24 Bio	2024	EPC/Konstruksi	62,13 vs 61,97
RDMP Cilacap	US\$ 3.56 Bio	2028	Desain Rekayasa dan Pra Studi Kelayakan	11,25 vs 11,24
RDMP Dumai	US\$ 2.24 Bio	2028	Pra Studi Kelayakan	Belum dimulai
RDMP Plaju	US\$ 2.00 Bio	2028	Pra Studi Kelayakan	Belum dimulai
Petrochemical Complex Jabar	US\$ 8.27 Bio	2029	Pencarian partner	Belum dimulai

Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas Asdep Energi 2023

Kendala Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi pada 6 proyek RDMP/GRR/ Petrochemical antara lain yaitu, 1). RDMP Balikpapan adalah Permohonan import permit baja dan produk turunannya; Permohonan izin pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas pemasangan pipa unloading 52” pada ruas jalan Kademan-Penajam; Penyesuaian perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Lawe-lawe ref. UU CK, Percepatan persetujuan Masterlist tahap 2 (PT KPI) dan tahap 3 (PT KPB) dan pembebasan bea masuk; **2). GRR Tuban** adalah Pelebaran Jalan dan Penguatan Jembatan Eksisting; Pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Gresik-Lamongan-Babat-Tuban, Reaktivasi infrastruktur railway kereta api dari Babat ke Tuban; Perpanjangan periode pengkreditan VAT Input saat ini 5 tahun menjadi 10 tahun dan Pembebasan VAT untuk seluruh barang modal; Dukungan pemenuhan porsi equity PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam skema kerjasama Proyek Kilang Minyak RI-Rusia (Rosneft) yakni Rosneft menagih pemenuhan porsi equity KPI untuk dapat closing *Final Investment Decision* (FID) atau keputusan final investasi; **3). RDMP Cilacap** adalah Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengelola lahan ex TNI AD; dan Belum didapatkan calon partner; **4). Petrochemical Jawa Barat** adalah belum didapatkan calon partner; **5). RDMP dan Green Refinery Plaju** adalah belum didapatkan calon partner; belum ada kepastian ketersediaan supply dan infrastruktur bahan baku; Belum ada kepastian pasar untuk domestic market; Relaksasi harga produk/penghapusan



pajak BBM; Percepatan pengurusan AMDAL; 6). RDMP Dumai adalah Belum didapatkan calon partner.

Tindak Lanjut Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi pada 7 proyek RDMP/GRR/ Petrochemical tahun 2024 antara lain yaitu, 1). RDMP Balikpapan adalah dukungan bimbingan teknis untuk prosedur pelaporan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); Percepatan penerbitan import permit barang modal/material proyek; Percepatan persetujuan KKPR Lawe-lawe; Percepatan persetujuan masterlist dan pembebasan bea masuk oleh Kemenperin dan Kemeninvest; 2). **GRR Tuban** adalah Dukunan Ditjen Bina Marga PUPR terkait usulan pelebaran jalan dan penguatan jembatan eksisting; Butuh persetujuan Ditjen PI Kemenkeu dan Ditjen Bina Marga PUPR untuk percepatan pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Gresik-Lamongan-Babat-Tuban; Mendorong persetujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub reaktivasi infrastruktur railway kereta api dari Babat ke Tuban; Perpanjangan periode pengkreditan *Value Added Tax* (VAT) Input saat ini 6 tahun menjadi 10 tahun serta pembebasan VAT untuk seluruh barang modal; Dukungan pinjaman/opsi-opsi pendanaan bagi PT KPI/Pertamina; 3). **RDMP Cilacap** adalah Dukungan pengkoordinasian dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengelola lahan ex TNI AD; Dukungan untuk pencarian partner; 4). **Petrochemical Jawa Barat** adalah Dikarenakan Partner Downstream/pengolah bahan mentah minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi adalah LG Chem namun sudah mengundurkan diri dari kerjasama, maka saat ini sedang diijaki 4 Company yang akan di approach yaitu INEOS, GS Global, UBE Tech, dan Shell; Dukungan untuk pencarian partner; 5). **RDMP dan Green Refinery Plaju** adalah Dukungan untuk pencarian partner; Kejelasan supply bahan baku melalui *Domestic Market Obligation* (DMO); Dukungan untuk penjajakan dengan beberapa perusahaan penerima/trader; Kepastian mandate terkait kebijakan beyond B30; Arahan dari KLHK terkait dokumen-dokumen kelengkapan AMDAL/ Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); 6). **RDMP Dumai** adalah Dukungan untuk pencarian partner.

3.3.2.3. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)

Dasar pelaksanaan Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) adalah untuk meningkatkan ketangguhan kota dalam

menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, maka dipandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Adapun pengelolaan sampah dalam masyarakat yang sebagai sumber daya, akan diolah menjadi energi listrik. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan Lokasi dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah adalah sebagai berikut 1). Provinsi DKI Jakarta; 2). Kota Tangerang; 3). Kota Tangerang Selatan; 4). Kota Bekasi; 5). Provinsi Jawa Barat; 6). Kota Semarang; 7). Kota Surakarta; 8). Kota Surabaya; 9). Kota Makassar; 10). Provinsi Bali; 11). Kota Palembang; dan 12). Provinsi Sulawesi Utara. Khusus PSEL Bali mengundurkan diri dari PSEL pada Tanggal 16 Juli 2021. Sedangkan untuk PSEL Surabaya telah dilakukan peresmian operasi PSEL Surabaya pada 6 Juni 2021 dan PSEL Surakarta Telah dilakukan peresmian operasi PSEL Surakarta pada 30 Oktober 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 12 Kota pada tahun 2023 tergambar dibawah ini.

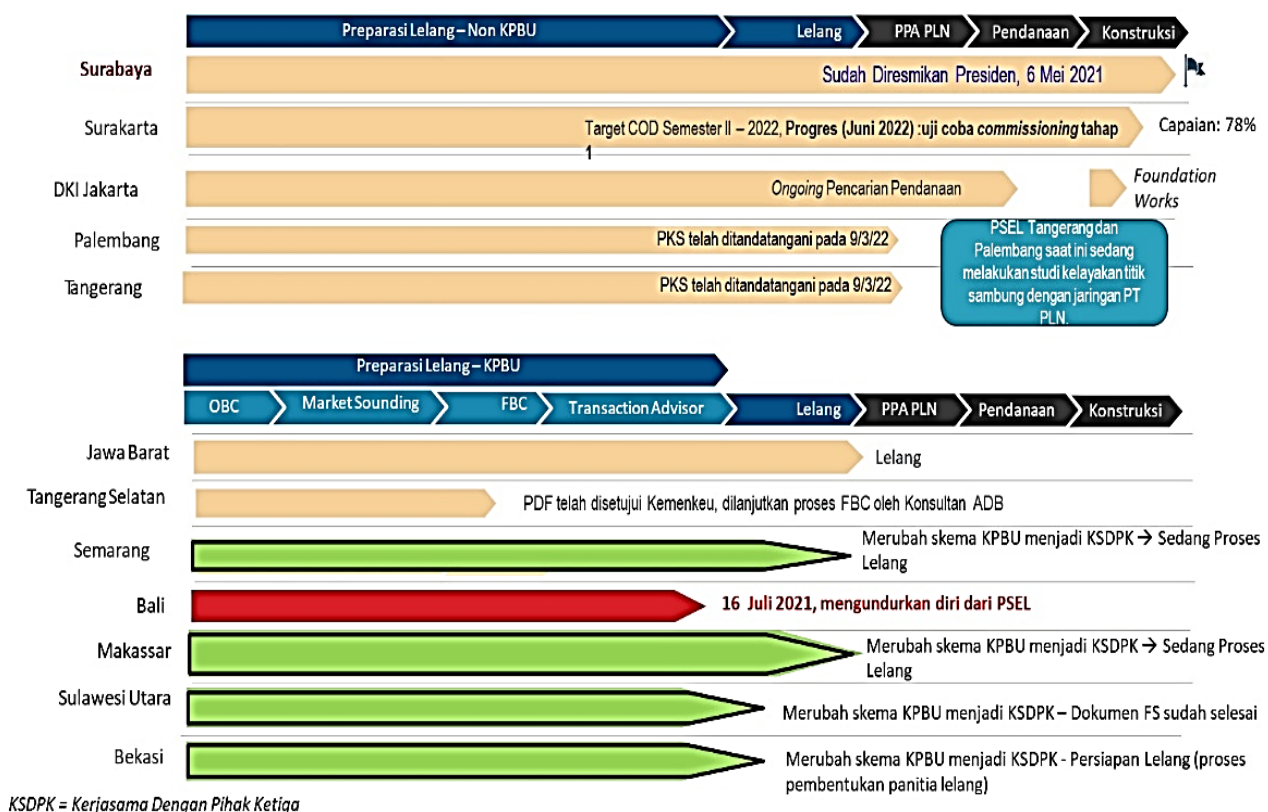
Gambar 3.10. Progress Proyek PSEL di 11 Kota pada tahun 2023

S T A T U S	Sudah diresmikan	Surabaya, Surakarta
	Sudah memiliki mitra kerjasama	Palembang, Tangerang, DKI Jakarta
	Penetapan mitra/pemenang lelang	Jawa Barat, Makassar
	Proses lelang	Bekasi
	Belum memiliki mitra	Semarang, Sulawesi Utara, Tangerang Selatan, dan Bali (mengundurkan diri)

Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional Asdep Energi 2023

Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 12 Kota pada tahun 2022 tergambar dibawah ini.

Gambar 3.11. Progress Proyek PSEL di 11 Kota pada tahun 2022



Sumber. Laporan Ringkasan Kebijakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional Asdep Energi 2022

Kendala Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) 2023, terdapat PSEL pada 10 kota adalah: 1). **PSEL DKI Jakarta** kendalanya, salah satu wilayah layanan yakni ITF Sunter masih dalam tahap pencarian mitra yang akan bekerjasama dengan BUMD Jakpro; 2). **PSEL Tangerang** kendalanya proses administrasi pra konstruksi dalam tahap penyelesaian; 3). **PSEL Tangerang Selatan** kendalanya belum memiliki mitra dan belum melaksanakan; 4). **PSEL Bekasi** kendalanya belum ditetapkan pemenang lelang; 5). **PSEL Jawa Barat** kendalanya masih melakukan kajian internal atas permohonan penyesuaian atas pembelian tenaga listrik dan bantuan pendanaan tidak sesuai dengan dokumen awal atau Request for Proposal (RFP); 6). **PSEL Semarang** kendalanya temuan dari BPK atas dasar Legal Opinion dari Kejari Semarang sehingga harus melakukan lelang ulang proyek PSEL Semarang; 7). **PSEL Palembang** kendalanya pemenuhan dokumen administratif lainnya sedang dilengkapi untuk dilanjutkan ke proses konstruksi; 8). **PSEL Makassar** kendalanya proses



penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemenang lelang dengan Pemkot Makassar masih menunggu proses masa sanggah pasca penetapan pemenang lelang selesai; 9). PSEL Sulawesi Utara kendalanya belum memiliki mitra dan belum melaksanakan lelang/tender; 10). PSEL Bali mengundurkan diri dari PSEL pada Tanggal 16 Juli 2021.

Tindak Lanjut Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di tahun 2024 adalah dengan memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki mitra, proses lelang, penetapan mitra, maupun yang sudah memiliki mitra mengingat PSEL merupakan PSN sehingga harus segera diselesaikan. Percepatan tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi intens dengan K/L maupun badan usaha yang menjadi kendala serta menetapkan target penyelesaian setidaknya untuk masuk dalam tahap konstruksi.

Success story Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam pelaksanaan fungsinya untuk Koordinasi dan Monitoring Progres Implementasi Perpres 35/2018 dalam Pembangunan Proyek PSEL di 12 Kota, telah berhasil mendorong peresmian operasi PSEL Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2023.

3.4. *Immediate Outcome* (SS.3. Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi)

Immediate Outcome merupakan pendekatan perspektif pada sasaran strategis ketiga pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, yang terdiri dari dua IKU, yaitu **Pertama**, Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. **Kedua**, Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Perspektif *immediate Outcome* memiliki bobot sebesar 0,2. Capaian *Immediate Outcome* pada tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Capaian Immediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

Perspektif	Capaian	Bobot
<i>Immediate Outcome</i>	100%	0,2

Defenisi Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merupakan suatu kondisi tercapainya target pembangunan kebijakan kedaulatan maritim dan energi melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi

masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan.

Sedangkan Capaian Kinerja *Immediate Outcome* Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Immediate Outcome Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Indikator Kinerja dan Bobot Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	2023 (%)		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	90	N/A**	N/A**
2	Presentase Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	72	75,45	104,79

** Terdapat perubahan mekanisme PMRB menjadi RB Tematik

3.4.1. IKU 6: Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Defenis Indikator ini menggambarkan Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan RB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Capaian Kinerja Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
Presentase Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	60%	91,60 %	75%	83,36 %	80%	90,14 %	N/A*	90,14**	95%

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

**) Hasil tahun 2022

Dasar Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan



RB di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Tujuan Nilai PMPRB adalah Menilai perkembangan pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pada tahun 2023 penilaian RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka setiap unit eselon 1 pada tahun 2023 melaksanakan RB Tematik. RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan. RB Tematik juga merupakan strategi baru dalam Road Map RB tahun 2020–2024. Dengan waktu yang terbatas, maka ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu: 1). Pengentasan Kemiskinan; 2). Peningkatan Investasi; 3). Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; 4). Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Kegiatan-kegiatan koordinasi berdasarkan tema RB Tematik yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan PMRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 adalah 1). **Pengentasan Kemiskinan** dengan kegiatan koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 Pilar ke 4 yakni terdapat 110 rencana aksi yang terdapat pada pilar 4 terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 2) **Peningkatan Investasi** dengan 5 kegiatan koordinasi, yaitu a). Koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 Pilar ke 4 yakni terdapat ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; b). Koordinasi Kerjasama Internasional dalam Kerangka *Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration* (Koordinasi Perluasan pasar Indonesia ke negara Selatan-Selatan); c). Koordinasi *Decommissioning* Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPP) Tidak Terpakai Di Perairan Indonesia (Pelaksanaan Korea-Indonesia *Offshore Plant Business Week 2023* serta Pembuatan National Strategy for Decommissioning); d). Koordinasi Revisi PP Nomor 27 Tahun 2017 dan Revisi PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil dan Perlakuan Pajak Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Rancangan Perpres Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas sebagai Upaya Peningkatan Investasi Sektor Minyak dan Gas; e). Koordinasi Upaya Pengecualian Aset Pertamina dari Sanksi US



kepada Venezuela (Identifikasi dan Menyusun Langkah strategis serta Melakukan berbagai opsi dan pendekatan terhadap Pemerintah US dan Pemerintah Venezuela; 3) **Percepatan Prioritas Aktual Presiden** dengan 7 kegiatan koordinasi, antara lain sebagai berikut: a). Koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; b). Koordinasi Penguatan Kerangka Institusional negara Pulau Dan Kepulauan/AIS Forum (tindak lanjut *leaders declaration* AIS Forum); c). Koordinasi Pemberlakuan Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura terkait *Realignment Flight Information Region* (FIR), *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dan Ekstradisi d). Koordinasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional; e) Koordinasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (Ruas Semarang-Batang); f). Koordinasi Desain Besar Ekosistem Pemanfaatan Gas Nasional; g). Koordinasi Penyusunan Rperpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpan Karbon (CCS) dan Rencana Investasi Fasilitas Petrokimia ExxonMobil.

Kendala pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah 1). Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II harus melakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Dalam melakukan identifikasi risiko, masing-masing UPR Eselon II merincikan tahapan kegiatan sebagai bagian dari *business process* yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari tahapan kegiatan dapat dilakukan analisis risiko untuk mendapatkan urutan level risiko dari yang tinggi sampai yang rendah; 3). Dengan teridentifikasinya Level Risiko maka UPR Eselon II memiliki penanganan dan pengendalian yang dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko, sehingga pemantauan dapat dilakukan berkala untuk meminimalisir risiko pada tahun berjalan; 4). Merujuk pada Permenko Marves Nomor 8/2023 pada Form Manajemen Risiko UPR Eselon II lingkup Deputy 1, perlu ditambahkan Analisis Risiko untuk mengetahui selera risiko sebagai bahan evaluasi manajemen risiko.

Tindak Lanjut pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2024 adalah melaksanakan Road Map RB Tematik tahun 2020–2024 melalui 3 tema, yakni Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

3.4.2. IKU 7: Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Defenis Indikator ini menggambarkan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah nilai atas capaian pelaksanaan SAKIP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Nilai yang didapat merupakan hasil evaluasi Inspektorat yang terdapat pada lembar hasil evaluasi (LHE). Capaian Kinerja Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70%	64,85 %	70%	67,53 %	70%	70,14 %	72%	75,45 %	N/A**

*) N/A (Not Available) = /RPJMN/target Nasional. IKU ini hanya digunakan untuk pengukuran kinerja di internal Kemenko Marves

**) tidak ada target pada dokumen Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Dasar Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan dievaluasi melalui Lembar Hasil Evaluasi (LHE), pelaksanaan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Penilaian evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada akhir triwulan II 2023 oleh tim Evaluator Inspektorat Kemenko Marves. Tujuan Nilai SAKIP adalah Menilai perkembangan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenko Marves dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (AKIP) pada tahun 2023 memiliki gambaran yang sangat baik 2/3 unit kerja eselon 2 .Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki

sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/ koordinator: Nilai hasil evaluasi 75,45 atau tingkat akuntabilitas kinerja **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**. Perincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26. Perincian Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

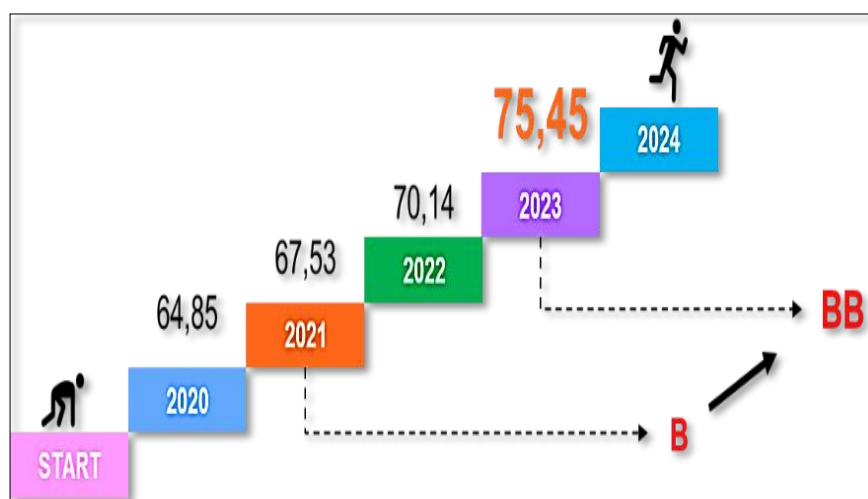
No.	Komponen	Evaluasi AK 2023	
		Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3.	Pelaporan Kinerja	25	20,25
4.	Evaluasi Internal	15	11,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	BB

Kendala pelaksanaan Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 berdasarkan penilaian inspektorat Kemenko Marves melalui data yang bersumber dari bulan Juni 2022 sampai Juni 2023, adalah sebagai berikut: 1). Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). telah tersedia namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan selama 5 tahun terakhir, b). belum seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merumuskan dan menetapkan SKP rencana tahun 2023; 2). Komponen Pengukuran Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Pengukuran Kinerja belum dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir; b). Belum ada inovatif dalam Pengukuran Kinerja dalam lingkup Deputy ini; c). Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment*; 3). Komponen Pelaporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Pelaporan Kinerja belum menggambarkan kinerja organisasi setidaknya dalam 5 tahun terakhir, belum dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu; b). Pelaporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; c). Pelaporan Kinerja belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional; 4). Komponen Evaluasi Internal Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain, yaitu a). Evaluasi Internal belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir; b). Evaluasi Internal belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang akan diterapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut 1). Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merumuskan dan menetapkan SKP rencana tahun 2023 selanjutnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; 2). Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *Reward and Punishment* (dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan); 3). Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja (*output*) serta dituangkan dalam laporan kinerja; 4). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan melakukan upaya inovatif dalam Perencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, serta diterapkan secara berkelanjutan.

Success story Hasil Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah nilai hasil evaluasi sebesar **75,45** atau tingkat akuntabilitas kinerja **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik** di bandingkan pada tahun 2022 adalah nilai hasil evaluasi sebesar 70,14 sehingga selisih kenaikan nilai hasil evaluasi sebesar 5,31 poin. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.12 di bawah ini.

Gambar 3.12. Nilai hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dari tahun 2020-2023



Peningkatan Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dikarenakan antara lain yaitu, 1). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berhasil meningkatkan Nilai SAKIP di tahun 2023 karena Deputy ini memperbaiki

evidence SAKIP berdasarkan Rekomendasi atau catatan Inspektorat pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) tahun 2022; 2). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di LKE untuk mendongkrak nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 3). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi meningkatkan kualitas evidence dalam pemenuhan kriteria pada LKE. Sedangkan perbandingan Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan Kedeputian lain dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.27. Perbandingan Penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan Kedeputian lain dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 sampai 2023

NO	2020	2021	2022	2023
1	SET (78,28)	SET (79,48)	SET (79,54)	SET (82,75)
2	D2 (71,78)	D2 (75,97)	D2 (75,87)	D6 (76,05)
3	D3 (71,20)	D6 (69,81)	D6 (71,45)	D2 (75,80)
4	D6 (65,31)	D3 (69,72)	D3 (71,20)	D1 (75,45)
5	D4 (65,15)	D4 (68,74)	D4 (70,75)	D4 (74,95)
6	D1 (64,85)	D1 (67,53)	D5 (70,40)	D5 (74,80)
7	D5 (64,51)	D5 (67,42)	D1 (70,14)	D3 (72,20)

Keterangan:

SET : Sekretariat Kementerian Koordinator

D1 : Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

D2 : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

D3 : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

D4 : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

D5 : Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

D6 : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan



3.5. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja lainnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah **Pertama**, Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang **Kedua**, Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini

3.5.1. Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang

Dasar pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi *middle income country* (MIC) dan anggota G-20, memposisikan Indonesia menjadi semakin berperan dalam berbagai forum regional dan internasional guna mempercepat capaian target pembangunan nasional. Salah satu strategi diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memaksimalkan peran Indonesia sebagai negara mitra strategis dan pemberi bantuan baik teknis, kemanusiaan, dukungan politis, dan inovasi keuangan serta hibah kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Dasar lainnya sebagai pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang yang lain adalah Risalah Rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beserta Pimpinan Internal eselon 1 serta eselon 2 pada tanggal 20 Juli 2023 (terlampir).

Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan kerja sama pembangunan sesama negara berkembang untuk membangun kemandirian kolektif yang akan memperkuat posisi negara berkembang di forum internasional. Dalam perkembangannya, situasi global setelah pandemi Covid-19 dan konflik negara-negara terkait keamanan energi dan kedaulatan negara semakin mengemuka termasuk pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara yang melambat, sehingga terdapat kecenderungan bantuan ekonomi negara-negara maju terhadap negaraberkembang mengalami kejenuhan (*aid fatigue*). *Aid Fatigue* merupakan konsekuensi dari berakhirnya Perang Dingin dan bipolar sistem, redistribusi kekuatan ekonomi diantara negara maju, kesulitan *balance of payment* dan ketidaksetujuan domestik. Hal itu menjadikan bantuan luar negeri tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara maju dan “lamban” nya negara maju atau badan donor untuk bertindak menanggapi kesulitan pembangunan atau ekonomi negara berkembang.

Menindaklanjuti komitmen untuk mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunanberkelanjutan, Indonesia menginisiasi



pembentukan suatu forum Kerja Sama Negara-Negara Berkembang. Pada tanggal 17 November 2022, Indonesia mengundang Menteri-Menteri dari Rwanda, RD Kongo, Afrika Selatan, Senegal, dan Badan Pembangunan Afrika AUDA-NEPAD untuk membicarakan gagasan awal potensi kerja sama yang dapat dilaksanakan antara Indonesia dengan masing-masing negara.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan kunjungan ke negara RD Kongo, Kenya, dan Zimbabwe pada 19-25 Januari 2023. Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara tersebut untuk mempererat kerja sama multisektor. Dalam kunjungan tersebut, negara-negara target juga telah menyetujui untuk membentuk sebuah task force yang berfungsi untuk mendetailkan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan masing-masing negara.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka **Target Kemenko Marves pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang** adalah mengambil peran memimpin di dalam misi kerjasama investasi melalui Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Afrika dan negara-negara berkembang lainnya.

Sumber daya Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah Forum kerja sama *Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration* yang digagas oleh Indonesia merupakan forum kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara berkembang di kawasan Afrika dan Amerika Selatan yang saling menguntungkan dan saling membangun sesama negara selatan-selatan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, penting untuk Indonesia menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dapat menguatkan posture Indonesia di negara-negara Afrika dan negara-negara berkembang lainnya.

Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang ditunjang oleh beberapa kegiatan, antara lain, Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke negara-negara Afrika merupakan salah satu *milestone* peninjauan kerja sama Indonesia-Afrika dimana agenda tersebut sebagai penegasan komitmen Indonesia hadir untuk membantu negara-negara berkembang dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Komitmen tersebut secara tegas disampaikan secara langsung dalam kunjungan kerja pertama

kalinya Presiden RI ke-7 pada kawasan Afrika, dengan menghadiri pertemuan kelompok Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke 15 tanggal 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Republik Afrika Selatan (Gambar 3.12).

Gambar 3.12. Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Menghadiri KTT) BRICS ke 15 tanggal 24 Agustus 2023 di Johannesburg, Republik Afrika Selatan.



Sumber Laporan Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration

Dikarenakan kerja sama B-to-B antara Indonesia dengan Afrika dipayungi oleh kerja sama G-to-G di tiap sektornya, maka Kemenko Marves terus memonitoring implementasi dari kerja sama tersebut. Hal ini tergambar dalam rangkaian pertemuan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan beberapa Negara di kawasan Afrika (Kenya, Afrika Selatan, Tanzania dan Mozambik), yang ditunjukkan pada Gambar 3.13. dibawah ini.

Gambar 3.13. Rangkaian Pertemuan Kerja Sama antara Indonesia dengan beberapa Negara di kawasan Afrika (Kenya, Afrika Selatan, Tanzania dan Mozambik) Tahun 2023.

Indonesia-Kenya

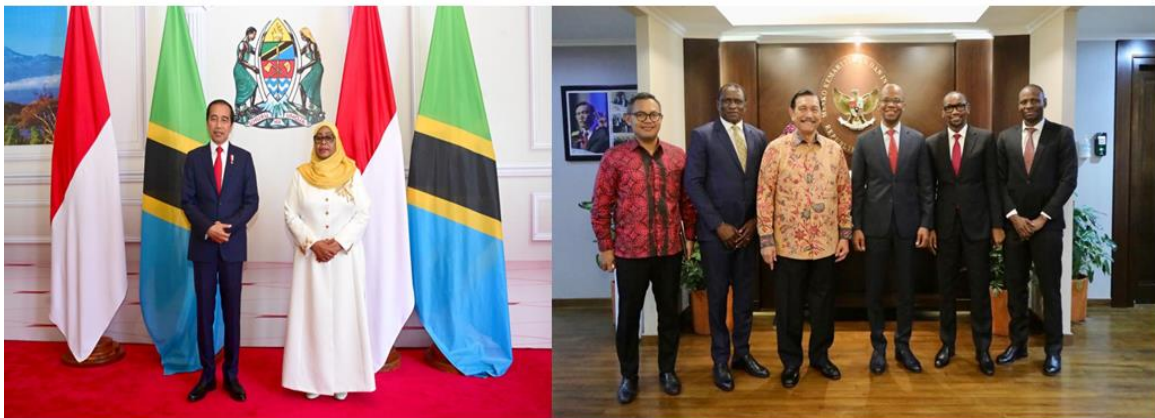


Sumber Laporan Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration

Indonesia-Afrika Selatan



Indonesia-Tanzania



Indonesia-Mozambik



Sumber Laporan Emerging Economies Cooperation/ Global South Collaboration

Penambahan anggaran yang diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam isu ini adalah sebesar Rp 2.920.995.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.2/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kemenko Marves (BA 120) untuk Rangkaian Kegiatan Kunjungan Presiden ke



Afrika dalam rangka Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang TA. 2023. Anggaran tersebut telah direalisasikan senilai Rp 2.912.270.932 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau sebanyak 99,70% (rincian terlampir).

Kendala Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah sebagai berikut; 1). Proses negosiasi MoU *G-to-G* dan *B-to-B* antara Indonesia dan negara-negara Afrika banyak terhambat karena kebijakan yang telah diambil oleh Pimpinannya tidak *terdeliver* ke level teknis, sehingga dalam level teknis negosiasi memerlukan waktu yang cukup lama;; 2). Konfirmasi penerimaan kehadiran Presiden Republik Indonesia ke negara-negara target sangat lama sehingga, rundown kunjungan baru terselesaikan H-7 hari sebelum pelaksanaan kunjungan;; 3). Kunjungan Presiden Republik Indonesia merupakan kunjungan bersejarah, dimana ini merupakan pertama kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke benua tersebut, sehingga beberapa negara mengajukan keinginan agar Presiden Joko Widodo turut hadir di negara-negara Afrika lainnya, namun jadwal yang padat menutup kemungkinan untuk Presiden berkunjung ke negara-negara lainnya; 4). Terdapat beberapa Eselon I Kemenko Marves yang tidak dapat hadir dikarenakan rombongan kenegaraan sudah full, sehingga anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak terpakai; 5). Implementasi kerja sama yang sudah disepakati terkendala karena kurangnya komitmen dari Pemerintah *counterpart*.

Tindak lanjut Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah, 1). Kemenko Marves akan memperluas kehadiran Indonesia di negara-negara berkembang di seluruh dunia, dan mendorong untuk terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan; 2). Kerja sama yang diharapkan bukan hanya perdagangan, namun sebagai upaya penguatan *posture* Indonesia, maka dalam agenda ini kami mendorong agar perusahaan Indonesia (BUMN/Swasta) dapat berinvestasi di Afrika dan juga merencanakan untuk memberikan *capacity building* di beberapa negara-negara Afrika yang ditargetkan.

Success story Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke-empat negara Afrika (Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan) dilaksanakan pada tanggal 20-24 Agustus 2023. Kunjungan Presiden Joko Widodo disambut baik oleh negara-negara Afrika dan berhasil



menghasilkan 12 kerja sama *G-to-G*, 20 kerja sama *B-to-B*, dan 1 kerja sama *G-to-B* dengan rincian sebagai berikut:

Kenya

1. *MoU on Cooperation in the Energy Sector (G-to-G)*
2. *MoU on Cooperation in the Field of Mining and Geology (G-to-G)*
3. *MoU on Regulatory Cooperation in the Field of Pharmaceutical Products (G-to-G)*
4. *LoI the Government of Indonesia and the Government of Kenya on Investment Promotion and Facilitation (G-to-G)*
5. *LoI Between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Livestock Development of the Republic of Kenya Concerning Strengthening Cooperation in Livestock Production and Animal Health (G-to-G)*
6. *MoU antara Trinusa Resources dengan Ministry for Mining, Blue Economy and Maritime Affairs (B-to-B)*
7. *MoU antara Busana Apparel Group dan Kenya Export Processing Zones Authority (B-to-B)*
8. *MoU antara Biofarma dan BioVax (B-to-B)*
9. *NDA antara Pertamina International EP dan National Oil Corporation of Kenya (NOCK) (B-to-B)*
10. *MoU antara Pertamina Geothermal Energy dan Africa Geothermal International No. 1 Limited (B-to-B)*
11. *MoU antara Biofarma dan Generics Africa on Registration, Sales and Distribution (B-to-B)*
12. *MoU antara PT Citra Anggun Persada (CAS, WINGS Group) dan Intellivision Global Administrators Limited (B-to-B)*
13. *MoU antara PT Combiphar dan TRAC Eco Pharma (B-to-B)*
14. *MoU between FKS Group and Kinnon Beef (B-to-B)*
15. *MoU on Strategic Alliance in Potential Projects in the Upstream, Midstream and Downstream Business antara Pertamina dengan Guma Africa Group Ltd (B-to-B)*
16. *MoU Pertamina Geothermal Energy dengan Geothermal Development Company Kenya (B-to-B)*

Afrika Selatan

1. *Defence Cooperation Agreement between Ministry of Defence (G-to-G)*
2. *MoU kerja sama PT. PINDAD dengan Rheinmetall terkait penyediaan amunisi dan propellent (B-to-B)*
3. *MoU on Strategic Alliance in Potential Projects in the Petroleum Upstream,*



Midstream, and Downstream Business antara Pertamina – GUMA (B-to-B)

4. Kerja Sama Pembelian Produk Kacang Kedelai dari SACOTA Afrika Selatan dengan FKS Group (B-to-B)

Tanzania

1. *MoU on the Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation (G-to-G)*
2. *Agreement on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports (G-to-G)*
3. *Memorandum of Understanding on Health Cooperation (G-to-G)*
4. *Memorandum of Understanding on Cooperation in the Energy Sector (G-to-G)*
5. *MoU Relating to Cooperation in the Activities related to Oil and Gas Business Value Chain between Pertamina and TPDC (B-to-B)*
6. *Memorandum of Understanding related to Cooperation in the Electricity Area between PLN and Tanesco (B-to-B)*
7. *Memorandum of Understanding between MIND ID and STAMICO (B-to-B)*

Mozambik

1. *Plan of Action for the Implementation of MoU on Marine and Fisheries Cooperation (G-to-G)*
2. *Memorandum on the Field of Medicines and Biological Products Control (G-to-G)*
3. *Letter of Intent on Bilateral Defence Cooperation (G-to-G)*
4. *Memorandum of Understanding between PT. Pertamina International Shipping and Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (B-to-B)*
5. *Memorandum of Understanding between Biofarma (Holding) and Kambeny Commercial LDA (B-to-B)*
6. *Memorandum of Understanding between Pertamina Internasional EP and EMP-BUZI (B-to-B)*
7. *Heads of Agreement between Energi Mega Persada-Buzi (EMP-BUZI) and Vutomi (B-to-B)*
8. *Memorandum of Understanding between Indonesia Chamber of Commerce and Mozambique Chamber of Commerce (B-to-B)*

3.5.2. Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini

Dasar pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah Papua Nugini merupakan salah satu negara yang telah menjalin hubungan kemitraan komprehensif dengan

Indonesia dan berbagi kepentingan bersama sebagai tetangga dekat Indonesia sejak tahun 1973 dan pada tahun 2016 kerja sama tersebut semakin ditingkatkan dalam bidang kebudayaan, perdagangan, gas alam cair hingga kerja sama militer. Papua Nugini juga merupakan salah satu negara di Pasifik dimana Indonesia melalui Poros Maritim Dunia mempunyai keinginan untuk memperkuat kerja sama antar kedua negara. Pelaksanaan percepatan implementasi kerja sama ini diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut peningkatan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini yang diawali oleh kunjungan Bapak Presiden RI ke Port Moresby pada 5 Juli 2023. **Dasar lainnya sebagai pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah** Risalah Rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beserta Pimpinan Internal eselon 1 serta eselon 2 pada tanggal 20 Juli 2023 (terlampir).

Gambar 3.13. Dokumentasi Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini pada 5 Juli 2023



Sumber. Laporan Percepatan Kerja Sama republik Indonesia dan Papua Nugini

Target pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah Indonesia berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan negara-negara pasifik termasuk Papua Nugini.

Kegiatan-Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah sebagai berikut, 1). tanggal 7-8 September 2023 telah terlaksananya kunjungan balasan oleh Perdana Menteri Papua Nugini ke Jakarta pada kegiatan *Indonesia Sustainability Forum*. Ketertarikan kuat Papua Nugini terhadap peluang kerja sama dengan Indonesia perlu disambut dan



ditindaklanjuti dengan baik, cepat dan terukur, sehingga langkah-langkah yang bersifat strategis dan terukur perlu segera dilakukan. Sisa waktu di akhir tahun 2023 setidaknya akan membuka dan mengidentifikasi area kerja sama yang berpotensi dapat didorong dalam konteks Peningkatan Kerja Sama Bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, diantaranya adalah sebagai berikut: Klaster Hilirisasi; Klaster Kelistrikan; Klaster Pendidikan; Klaster Konektivitas; dan Klaster Infrastruktur; 2) Koordinasi awal atau kick off meeting dalam rangka brainstorming peluang kerja sama yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dari hasil diskusi dengan stakeholder terkait, terdapat beberapa klaster atau area kerja sama yang akan diupayakan dalam peningkatan kerja sama tersebut, yaitu klaster hilirisasi, kelistrikan, pendidikan, infrastruktur dan konektivitas. Rapat tersebut dilaksanakan di Bandung pada tanggal 19 Oktober 2023; 3). Koordinasi persiapan pembentukan satuan tugas percepatan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini serta pembahasan peluang kerja sama di sektor pendidikan. Dalam rapat tersebut beberapa yang dapat diidentifikasi adalah peluang kerja sama terkait beasiswa pendidikan untuk masyarakat Papua Nugini yang akan berfokus pada pendidikan vokasi, peluang pengiriman tenaga pendidik ke Papua Nugini termasuk pelatihan kurikulum sekolah menengah kejuruan. Selain itu, PT. Pelindo bersedia untuk membuka program magang bagi pelajar/mahasiswa Papua Nugini; 4). Koordinasi persiapan pelaksanaan *capacity building* dengan tema *Bluepreuner : Coastal Women Communities*. Kegiatan pelatihan tersebut akan melibatkan kurang lebih 35 peserta dari Papua Nugini termasuk dari kaum disabilitas. Pada program ini Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Sekretariat AIS Forum dalam memberikan pelatihan pengolahan produk-produk hasil laut dan perikanan. Pelatihan tersebut akan menghadirkan pakar/expert dari Indonesia yang telah memiliki pengalaman di bidangnya.; 5). Koordinasi dalam rangka mengidentifikasi peluang kerja sama klaster hilirisasi, infrastruktur dan konektivitas. Terkait dengan hilirisasi, Kementerian ESDM menyampaikan dukungannya jika Papua Nugini berkenan untuk melakukan investasi dalam proses smelter dan hilirisasi. Selain itu keterlibatan BUMN terkait hilirisasi nikel dan lithium juga akan coba dilakukan peninjauan lebih fokus. Dari sektor infrastruktur, terdapatnya proyek hibah yang sudah mulai



dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya pembangunan fasilitas sekolah di wilayah Wutung, pembangunan fasilitas pendukung kantor atau markas pemadam kebakaran di daerah Vanimo dan rumah sakit di daerah Port Moresby. Selain itu pembangunan pos-pos perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini dalam rangka mengurangi kegiatan ilegal pada jalan-jalan kecil yang berpotensi adanya kegiatan penyelundupan narkoba dan senjata api. Konektivitas melalui laut berpotensi memberikan dampak yang efisien sehingga stakeholder pelayaran perlu meningkatkan intensitas pelayaran. Rute pelayaran yang sudah ada adalah rute pelayaran antara Jayapura dan Vanimo walaupun masih relatif terbatas pada kapal barang. Peluang adanya penambahan rute penerbangan yang menghubungkan Indonesia dan Papua Nugini juga masuk dalam pembahasan peningkatan kerja sama tersebut. Saat ini satu-satunya rute penerbangan (direct flight) hanya Denpasar menuju Port Moresby; 6). Koordinasi Percepatan PT PLN (Persero) Pemenuhan Kebutuhan Listrik Antar Negara di Desa Wutung yang menjadi batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini. PLN telah expand dengan memasang 28 tiang listrik di daerah wutung, namun belum dialirkan ke rumah warga dengan pertimbangan perlu mitigasi manajemen resiko yang masih dalam tahapan penyiapan. Saat ini telah terdapat 12 titik yang telah dialiri dan dapat menerangi untuk lampu jalanan. MoU dengan pihak Papua Nugini dalam hal ini antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan PNG Power Ltd (PPL) telah ditandatangani, namun saat ini Power Purchase Agreement (PPA) masih dalam proses penyusunan dan besaran tarif belum menemui kata sepakat. Dalam hal terkait dengan jual beli tenaga listrik di atur dalam PP No. 42 Tahun 2012; 7). Koordinasi Kerjasama Industri antara Indonesia-Papua Nugini Melalui Konsolidasi Pengembangan Hilirisasi Kawasan Industrial pada PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Konsolidasi dimaksud untuk dapat menyaksikan berbagai tahapan proses pengembangan hilirisasi kawasan industrial, estimasi kebutuhan dan identifikasi kendala teknis, hingga target produksi. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memetakan agenda prioritas pembangunan industri pertambangan yang akan dikerjasamakan antara RI dan Papua Nugini. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan lapangan ini, direncanakan wakil PM Papua Nugini akan mengunjungi Morowali pada Februari 2024; 8).



Koordinasi dalam rangka persiapan keberangkatan tim ke Papua Nugini dihadiri oleh perwakilan dari K/L terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM dan internal Kemenko Marves. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar pendapat dan masukan mengenai persiapan delegasi kunjungan ke Papua Nugini. Selain dari itu, rapat ini menyampaikan teknis pelaksanaan capacity building yang akan dilakukan nanti di Papua Nugini. Dari pertemuan ini diputuskan bahwa akan ada pertemuan Joint Border Committee (JBC) dan Border Liaison Meeting (BLM) pada tanggal 5-7 Desember 2023; 9). Koordinasi Peningkatan Capacity Building antara Indonesia-Papua Nugini melalui *Bluepreneur : Coastal Women Communities* merupakan kegiatan pelatihan yang melibatkan kurang lebih 35 peserta dari Papua Nugini termasuk dari kaum disabilitas. Pelatihan ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas. Pada program ini Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Sekretariat AIS Forum dalam memberikan pelatihan pengolahan produk-produk hasil laut dan perikanan. Pelatihan tersebut akan menghadirkan pakar/expert dari Indonesia yang telah memiliki pengalaman di bidangnya. Selama pelatihan, para pelaku usaha diberikan teknik/cara mengolah ikan dan rumput laut dari bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi dan dipasarkan. Selain itu, diajarkan pula bagaimana cara pengemasan dan pemasaran barang tersebut melalui kanal media- sosial; 10). Koordinasi Percepatan Bilateral Indonesia-Papua Nugini dalam sektor Perdagangan Internasional dan Investasi. Pertemuan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Internasional dan Investasi Papua Nugini Bapak Jacinta Manoa dengan Delegasi Indonesia yang dilaksanakan pada 5 Desember 2023, untuk memberikan presentasi dan membahas mengenai perkembangan hilirisasi pertambangan di Indonesia serta opsi-opsi kerjasama yang dapat dijajaki oleh kedua negara terutama dalam sektor energi. Selain dari itu, delegasi Indonesia juga memberikan paparan mengenai kapasitas Indonesia dan kesiapan Indonesia untuk berbagi best practices dalam program hilirisasi ESDM pada Papua Nugini. Pertemuan ini mendapatkan respon positif dari pemerintah Papua Nugini yang juga memiliki visi untuk mengembangkan industri hilirisasi di bidang ESDM. Meskipun begitu, terdapat berbagai kendala yang perlu diselesaikan oleh pihak Papua Nugini. Salah satu olusi yang sedang dijajaki



oleh Papua Nugini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan para investor melalui berbagai kemudahan; 11). Koordinasi 17th Border Liaison Meeting (BLM) dan 38th Joint Border Committee (JBC) yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2023 di APEC Haus, Port Moresby. Delegasi Indonesia yang terdiri atas Kemenko Marves, Kemdagri, Kemlu, Kementerian ESDM, dan tim dari Pemprov Papua mengangkat isu-isu yang dapat disepakati dan ditindaklanjuti pada level teknis seperti Terhambatnya kesepakatan *Power Purchasing Agreement* antara PNG Power dan PT PLN; *MoU on Cross Border Land Transportation*; serta Diseminasi informasi kepada berbagai pemangku kebijakan terkait pemberlakuan MoU Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas kedua negara.

Kendala pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah antara lain, 1) Waktu yang relatif singkat untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kerja sama tersebut. Terlebih pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilakukan bergantung pada turunnya anggaran belanja tambahan yang diajukan dan pelaksanaan kegiatannya diselenggarakan pada triwulan terakhir Tahun Anggaran 2023; 2) Peluang kesempatan peningkatan kerja sama ini merupakan momentum yang sangat baik sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, sehingga dalam mengidentifikasi area kerja sama yang akan dilakukan perlu banyak melibatkan stakeholder terkait dalam diskusi maupun koordinasi-koordinasi yang dilakukan; 3) Dalam proses pelaksanaan MoU antara PLN dan PPL saat ini terkendala dengan proses penyusunan Power Purchase Agreement (PPA) yang belum final. Hal ini dikarenakan belum disepakatinya terkait tarif listrik yang akan diberlakukan. Sehingga terkait izin jual beli tenaga listrik lintas negara, belum dapat ditindaklanjuti prosesnya.

Penambahan anggaran yang diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam isu ini sebesar Rp 2.700.305.000 (Dua miliar tujuh ratus juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.2/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA



999.08) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kemenko Marves (BA 120) untuk Kebutuhan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Kegiatan terkait Isu Strategis yaitu Rangkaian Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Indonesia Papua Nugini Tahun Anggaran 2023. Pada perjalanannya terdapat beberapa revisi yang terjadi dalam rangka optimalisasi dan penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran belanja tambahan yang telah diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebesar Rp. 2.700.305.000,- (Dua miliar tujuh ratus juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan dapat kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, anggaran belanja tambahan tersebut dapat direalisasikan dalam penggunaannya sebesar Rp.2.656.926.522,- (Dua miliar enam ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 98,39 %.

Tindak lanjut pelaksanaan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah diantaranya: 1). Produk minerba di Indonesia akan dilakukan akselerasi standar nasional sehingga dapat semakin meningkatkan daya tarik investor ke Indonesia. Selain itu Pemerintah Papua Nugini sedang bersiap untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus untuk hilirisasi nikel dengan mengadopsi atau menjadikan regulasi yang berlaku di Indonesia sebagai referensi; 2). Pemerintah Papua Nugini yang direncanakan diwakili oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Menteri Investasi, akan melakukan kunjungan (lapangan) ke Indonesia. Selain smelter PT. IMIP di Morowali, PT Weda Bay menjadi salah satu request lokasi tambahan dari Pemerintah Papua Nugini; 3). Kesepakatan tarif listrik yang berpedoman pada PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara agar segera diselesaikan dan Kemenko Marves segera mengoordinasikan terkait akselerasi penugasan PLN dari Kementerian ESDM dan BUMN sebagai legal aspect dari jual beli tenaga listrik ke Papua Nugini. 4). Dalam Joint Border Committee dan Border Liaison Meeting muncul beberapa kesepakatan yang perlu untuk ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut Review Special Agreement, Basic Agreement on Border Arrangement, MoU PNG Power dan PLN, dan MoU Cross Border Land and Transportation. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 2 MoU sebagai respon yang

terkait dengan Transport of Goods dan Basic Transportation dan sudah disampaikan ke KBRI dan saat ini sedang menunggu counter draft MoU dari pihak Papua Nugini. Hanya saja, Border Land Transport yang termasuk didalamnya kendaraan biasa, kendaraan diplomatik, dan lainnya tidak termasuk pada dua MoU tersebut.

3.6. Analisa Keuangan

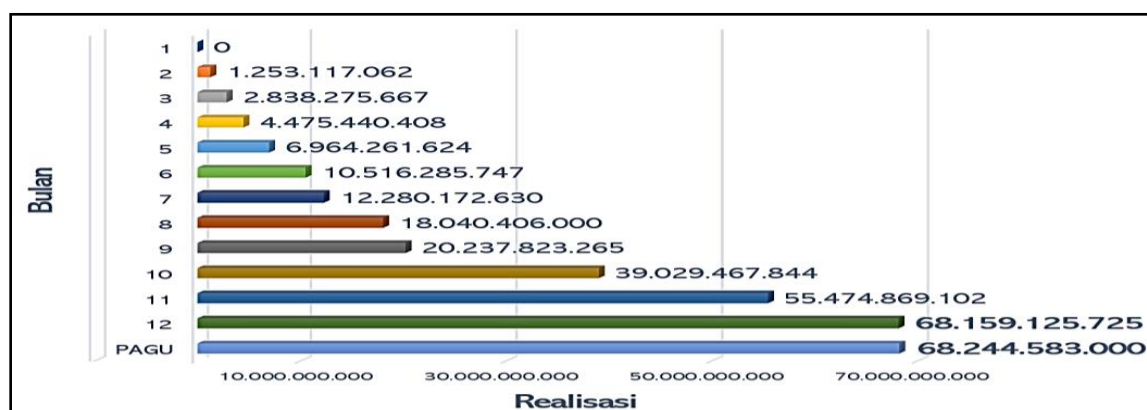
Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 30 Desember 2023 di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 3. 27, Realisasi Anggaran UKE II per 30 Desember 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi*

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Presentase
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Rp 4.638.701.000	Rp. 4.588.797.284	98,92%
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Rp 6.603.429.000	Rp. 6.592.793.673	99,84%
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Rp 41.186.397.000	Rp. 41.184.802.030	100%
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Rp 2.434.228.000	Rp. 2.433.293.654	99,98%
Asisten Deputi Energi	Rp1.882.985.000	Rp. 1.882.829.080	99,99%
RO Kebijakan Pengendalian Sekretariat Deputi	Rp 9.580.081.000	Rp. 9.561.662.578	99,81%
	Rp 1.918.762,000	Rp. 1.914.947.426	99,80%
Total	Rp 68.244.583.000	Rp.68.159.125.725	99,87%

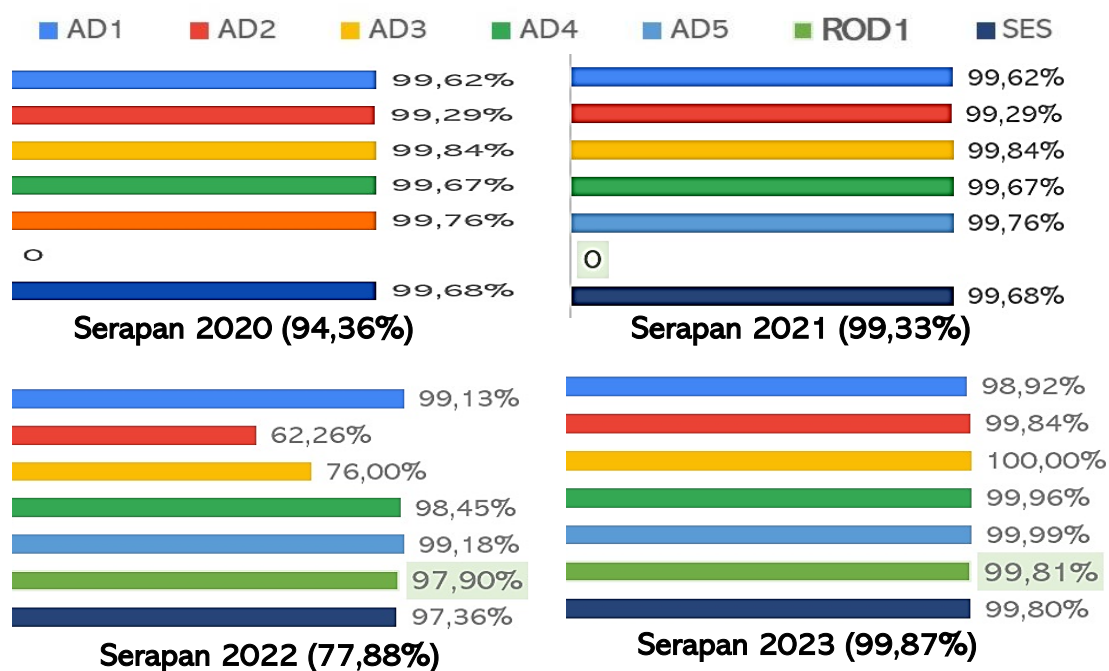
*)dalam Rupiah

Gambar 3.14. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Per Balun pada Tahun 2023



Capaian Kinerja Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 mencapai **Rp. 68.159.125.725,- (99,87%)** dari total Anggaran sebesar Rp. 68.244.583.000,-. Adapun realisasi capaian kinerja keuangan pada Unit Kerja Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat dibawah ini

Gambar 3.15. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran per UKE II Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023



Gambar 3.23. menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2022, 2021 dan 2020, hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam rencana aksi setiap Unit Kerja Eselon II tahun 2023 dengan baik.

Sedangkan Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II per 30 Desember 2023 di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan RO dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional di Bidang Maritim dan Energi	555.501.000	554.779.601	721.399	99,87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perjanjian Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang Maritim dan Energi	3.812.490.000	3.763.405.823	49.084.177	98,71
	Pengendalian Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025	270.710.000	270.611.860	98.140	99,96
Total		4.638.701.000	4.588.797.284	49.903.716	98,92

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Rancangan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengendalian Kebijakan Keamanan, Pengawasan dan Kewaspadaan Maritim	2.045.793.000	2.045.638.920	154.080	99,99
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Maritim Nasional	3.358.077.000	3.349.280.602	8.796.398	99,74
	Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	597.527.000	597.289.491	237.509	99,96
	Pengendalian Kebijakan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan	602.032.000	600.584.660	1.447.340	99,76
Total		6.603.423.000	6.592.793.673	10.629.327	99,84

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Rancangan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi	483.041.000	483.024.615	16.385	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan	822.837.000	822.821.644	15.356	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional	688.009.000	687.985.410	23.590	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	39.192.510.000	39.190.970.361	1.539.639	100
Total		41.186.397.000	41.184.802.030	1.594.970	100

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Rancangan Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kenavigasian Nasional dan Internasional	964.567.000	964.464.510	102.490	99,99
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan Maritim	650.391.000	649.839.480	551.520	99,92
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Risk Assessment Daerah Rawan Kecelakaan	519.771.000	519.574.764	196.236	99,96
	Pengendalian Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	299.499.000	299.414.900	84.100	99,97
Total		2.434.228.000	2.433.293.654	934.346	99,96

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Keuangan Asisten Deputi Energi Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Rancangan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	540.005.000	539.976.426	28.574	99,99
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional	606.113.000	606.013.959	99.041	99,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencapaian Rasio Elektrifikasi Listrik Nasional	736.867.000	736.838.695	28.305	100,00
Total		1.882.985.000	1.882.829.080	155.920	99,99

Tabel 3.33. Capaian Kinerja Keuangan Kebijakan Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Pengendalian Program Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	9.580.081.000	9.561.662.578	18.418.422	99,81
Total		9.580.081.000	9.561.662.578	18.418.422	99,81

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Keuangan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

IKU	RO	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
				(Rp.)	%
Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	439.277.000	438.319.084	957.916	99,78
	Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	629.485.000	628.005.193	1.479.807	99,76
Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	330.526.000	330.521.244	4.756	100,00
	Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	327.383.000	326.012.322	1.370.678	99,58
	Laporan Kegiatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	192.091.000	192.089.583	1.417	100,00
Total		1.918.762.000	1.914.947.426	3.814.574	99,81

3.7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melalui Anggaran pada Komponen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kerjasama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar Rp.50.020.000.000,- dapat diefisiensi menjadi Rp.39.192.510.000,- dan dimaksimalkan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 sebesar Rp.10.827.490.000,-, yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.24. dibawah ini.

Tabel 3. 34, Efisiensi anggaran Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023

No	Bulan	Uraian	Pagu Semula AIS Forum (Rp.)	Pagu Perubahan AIS Forum (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	Juli	Optimalisasi/Co-Sharing pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Negara-negara Berkembang (Emerging Economies Cooperation - EEC)	50.020.000.000	48.598.895.744	1.421.104.256
2	Oktober	Rp.3,250,000,000 Mendukung Pelaksanaan Pengendalian Major Project Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi	48.598.896.000	44.565.896.000	4.033.000.000
		Rp.233,000,000 Optimalisasi/Co-Sharing pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Kunjungan Presiden ke Afrika dalam Rangka Peningkatan Kerja Sama Negara-negara Berkembang (EEC)			
		Rp.550,000,000 Mendukung pelaksanaan koordinasi <i>Decommissioning</i> Anjungan Migas dan <i>Forum Dialogue</i>			

		Pemerintah RI dengan Asosiasi Pelayaran Internasional			
3	Desember	Mendukung Pelaksanaan RAKORNAS Bidang Kemaritiman dan Investasi serta beberapa rangkaian kegiatan strategis pengendalian major project bidang kedaulatan maritim dan energi	44.565.896.000	39.192.510.000	5.373.386.000

3.8. EAnalisa Sumber Daya

3.8.1. Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 63 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 55 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 8 orang. Khusus Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan jabatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.35. dibawah ini.

Tabel 3.35. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Berdasarkan Jabatan pada Tahun 2023

Jabatan	Jumlah Pegawai Pria	Jumlah Pegawai Perempuan
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	1	
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	5	1
Jabatan Fungsional Ahli Madya	7	5
Jabatan Fungsional Ahli Muda	1	3
Jabatan Fungsional Ahli Pertama	8	4
Jabatan Pelaksana	12	8
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	7	1
Total	41 Orang	22 Orang

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.36. dibawah ini.

*Tabel 3.35. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023*

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	6
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
Penata Muda (III/a)	14
Total	55 Orang

Sedangkan Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesrasi adalah sebagai berikut.

*Tabel 3.36. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
berdasarkan pendidikan terakhir tahun 2023*

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	30
Strata Dua	23
Starata Tiga	1
Total	55 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	7
Total	8 Orang

Adapun usulan kebutuhan jabatan fungsional Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Peta Jabatan Di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, dapat dilihat dalam tabel 3.37. dibawah ini.

Tabel 3.37. Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dan Energi Tahun 2023

No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
1.	Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	2	• Analis Kebijakan Ahli Madya	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
				• Analis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves (naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020).
2.	Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	• Analis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves.
3.	Asisten Deputy	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			(selisih 1)
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	

No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
	Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020.
		• Analis Hukum Ahli Pertama	1			
		• Analis Hukum Ahli Pertama	1			
4.	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Diusulkan Ukom sebagai Analisis Kebijakan Muda sesuai ND PIh Ses No ND.32/D1.0/KP.06.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	1			Diusulkan Ukom sebagai Analisis Kebijakan Muda
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
5.	Asisten Deputi Energi	• Analis Kebijakan Ahli Madya	3			(selisih 1)
		• Analis Kebijakan Ahli Muda	2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			
		• Analis Kebijakan Ahli Pertama	1			naik pangkat tahun depan regular di tahun 2025 karena TMT 1 Desember 2020.
6.	Sekretariat Deputi	• Analis Kebijakan Ahli Utama	1			Apakah tetap mau dipertahankan atau dihapus?

No.	Unit Kerja Eselon II	Peta Jabatan Fungsional (Eksisting) (Kepmenko No.35 Tahun 2023)	Jumlah	Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional/ Struktural (Update Peta Jabatan Baru)	Jumlah	Ket.
	Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1			1. lulus Ukom sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor: 5786/K.1/JFT.02.3 tanggal 22 Agustus 2023 ATAU 2. sesuai ND Sesdep Nomor 023.D1.0/HM.02.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 hal Pemberian rekomendasi sebagai AK Muda di Setdep D1
		Perencana Ahli Pertama	1			Usulan melalui ND Deputy 2 kepada Deputy 1 Nomor ND.06.2/D2/KP.09.03/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023.
				Pranata Komputer Ahli Muda	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
				Analisis Hukum Ahli Pertama	1	Diusulkan penambahan jabatan fungsional pada peta jabatan Kemenko Marves
				Kasubbag TU	1	Diusulkan penambahan jabatan pelaksana pada peta jabatan Kemenko Marves

3.8.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep *Activity Based Workplace* (ABW), yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *workstation/desk* secara khusus, dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif, mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas (Tabel 3.38). Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building*, *Work-life Balance*, *Collaborative*, *Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 3.38. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil reviu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam PermenPPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PermenPPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reviu belum dapat dilakukan. Atas rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil reviu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Scorecard.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 3 SS dari 14 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 5 IKU dari 17 IKU pada Renstra sebelumnya

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu, Terwujudnya Penegakan Kedaulatan Maritim dan Ketahanan Energi Nasional yang Merata dan Efisien (SS.1), Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.2), dan Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (SS.3) pada Tahun 2023.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formula dalam Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim (Tahun 2023). Ketiga Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tersebut dibagi dalam 4 Perspektif, yakni *Ultimate Outcome*, *Intermediate Outcome*, *Immediate Outcome* dan *Output*

Perspektif pertama *Ultimate Outcome* adalah SS.1 yang memiliki 3 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1) **Persentase Capaian Indeks Ketahanan Energi dengan realisasi sebesar 113,5% dengan target 100%**; 2). **Kedaulatan Maritim dengan realisasi sebesar 78,30% dengan target 70% yang**



dikonversikan menjadi nilai 3 (Berdaulat); dan 3). Efektivitas Diplomasi Maritim dengan realisasi sebesar 75,80% dengan target 70%..

Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: **4) Presentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, dimana rekomendasi terdiri dari 5 koordinasi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 antara lain;**

- a). Rekomendasi dari Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 pada tahun 2023 adalah Melakukan optimalisasi Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk melalui Kepmenko dalam rangka asistensi percepatan pelaksanaan dan pelaporan implementasi Renaksi KKI;**
- b). Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah mengidentifikasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk menyusun program berbasis keahlian, peningkatankapasitas baik SDM maupun kelembagaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur strategis dan penunjang untuk memaksimalkan potensi WP3K;**
- c). Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) tahun 2023 adalah Menyiapkan Kebijakan dan Posisi Pemerintah Indonesia Sebagai Inisiator Utama dan Penggerak Utama AIS Forum tetapi tetap Secara Inklusif Melibatkan Negara-Negara Partisipan Lainnya;**
- d). Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim tahun 2023 adalah Penyempurnaan substansi pada Dokumen SMK-3 dilakukan secara berkelanjutan, sambil menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah mengenai Industri Maritim;**
- e). Rekomendasi Peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas tahun 2023 adalah Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Hulu Migas.**

Sedangkan Perspektif kedua *Intermediate Outcome* adalah SS.2 untuk IKU 5). **Presentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan, dengan realisasi sebesar 100%, dimana Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan terdiri dari 3 Isu Strategis yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2023 antara lain;**

- a). Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional melalui Koordinasi Penurunan harga gas di Indonesia;**
- b). Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi melalui 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Kilang Existing (*Refinery Development Master Plan /RDMP*) dan Pembangunan Kilang Baru/*Grass Root***



Refinery (GRR) yakni RDMP Balongan, RDMP Balikpapan, RDMP Cilacap, GRR Tuban, Petrochemical Jawa Barat, RDMP Dumai, dan RDMP Plaju; dan c). Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 12 tempat, yakni Provinsi DKI Jakarta; Kota Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kota Bekasi; Provinsi Jawa Barat; Kota Semarang; Kota Surakarta; Kota Surabaya; Kota Makassar; Provinsi Bali; Kota Palembang; dan Provinsi Sulawesi Utara.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 yang memiliki 2 IKU dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut: **6) Presentase Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dengan realisasi sebesar masih menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 90,14%, dikarenakan perubahan mekanisme penilaian PMRB berubah menjadi RB Tematik. Pelaksanaan RB Tematik Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 melalui 3 tema untuk melaksanakan koordinasi yang langsung menyentuh masyarakat, yakni: A). Pengentasan Kemiskinan dengan kegiatan koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 Pilar ke 4 yakni terdapat 110 rencana aksi yang terdapat pada pilar 4 terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; B) Peningkatan Investasi dengan 5 kegiatan koordinasi, yaitu a). Koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 Pilar ke 4 yakni terdapat ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; b). Koordinasi Kerjasama Internasional dalam Kerangka *Emerging Economies Cooperation/Global South Collaboration* (Koordinasi Perluasan pasar Indonesia ke negara Selatan-Selatan); c). Koordinasi *Decommissioning* Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLPL) Tidak Terpakai Di Perairan Indonesia (Pelaksanaan Korea-Indonesia *Offshore Plant Business Week 2023* serta Pembuatan National Strategy for Decommissioning); d). Koordinasi Revisi PP Nomor 27 Tahun 2017 dan Revisi PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil dan Perlakuan Pajak Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Rancangan Perpres Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas sebagai Upaya Peningkatan Investasi Sektor Minyak dan Gas; e). Koordinasi Upaya Pengecualian Aset Pertamina dari Sanksi US kepada Venezuela (Identifikasi dan Menyusun Langkah strategis serta Melakukan berbagai opsi dan pendekatan terhadap Pemerintah US dan Pemerintah Venezuela; C) Percepatan Prioritas Aktual Presiden dengan 7 kegiatan koordinasi, antara lain sebagai berikut: a). Koordinasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; b). Koordinasi Penguatan Kerangka Institusional negara Pulau Dan Kepulauan/AIS Forum (tindak lanjut *leaders declaration* AIS Forum); c). Koordinasi Pemberlakuan Perjanjian Bilateral**



Indonesia-Singapura terkait *Realignment Flight Information Region (FIR)*, *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dan Ekstradisi d). Koordinasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional; e) Koordinasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (Ruas Semarang-Batang); f). Koordinasi Desain Besar Ekosistem Pemanfaatan Gas Nasional; g). Koordinasi Penyusunan Rperpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpan Karbon (CCS) dan Rencana Investasi Fasilitas Petrokimia ExxonMobil.

Perspektif ketiga *Immediate Outcome* adalah SS.3 untuk IKU 7) **Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 75,45% dengan target sebesar 72%, yang melebihi target Presentase Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023.**

Capaian Kinerja Keuangan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tahun 2023 mencapai Rp39.192.510.000,- dengan sisa pagu sebesar Rp.5.373.386.000,- dari total Anggaran sebesar Rp.44.565.896.000,, Sedangkan Anggaran pada Komponen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kerjasama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) sebesar Rp.50.020.000.000,- dapat diefisiensi menjadi Rp.39.192.510.000,- dan dimaksimalkan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023 sebesar Rp.10.827.490.000,-.

Capaian Kinerja lainnya tahun 2023 yang Pertama dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah **Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS).** Kerja sama tersebut menghasilkan penandatanganan MOU antara Indonesia dengan beberapa negara di benua Afrika pada tahun 2023. 1). MOU antara Indonesia-Kenya menghasilkan 16 MOU; 2). MOU antara Indonesia-Afrika Selatan menghasilkan 4 MOU; 3). MOU antara Indonesia-Tanzania menghasilkan 7 MOU; 4). MOU antara Indonesia-Mozambik menghasilkan 8 MOU. Anggaran belanja tambahan yang diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 untuk **Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS)** adalah sebesar Rp2.920.995.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.912.270.932,- atau sebanyak 99,70%.



Capaian Kinerja lainnya tahun 2023 yang Kedua dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah **Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini**. Peningkatan Kerja Sama Bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, diantaranya adalah sebagai berikut: Klaster Hilirisasi; Klaster Kelistrikan; Klaster Pendidikan; Klaster Konektivitas; dan Klaster Infrastruktur. Anggaran belanja tambahan yang telah diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk **Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini** adalah sebesar Rp.2.700.305.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.656.926.522,- atau sebesar 98,39 %.

4.2. Prestasi/success story

Prestasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim semakin meningkat dari tahun 2020 dengan realisasi sebesar 64,79%, tahun 2021 dengan realisasi sebesar 66,36%, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 70,28% dan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 75,52% dengan nilai konversi sama dengan 3 (Efektif), yang sesuai dengan target Rencana Strategis Kemenko Marves.
2. Koordinasi Rancangan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025 menghasilkan Kepmenko Marves No. 113/D1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Penyesuaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, yang ditetapkan pada Tanggal 20 Februari 2023.
3. Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) menghasilkan **Pertama**, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau Dan Kepulauan (*Arcfiipeiagic and Island States*) Forum Tahun 2023, yang ditetapkan pada Tanggal 11 September 2023. **Kedua**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Senior Official Meeting* (SOM) ke 7 AIS Forum di Suva – Republik Fiji pada tanggal 7 Juni 2023 yang berhasil meningkatkan rasa kepemilikan negara-negara AIS Forum terhadap inisiatif dan program AIS Forum; **Ketiga**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan *Ministerial Meeting* (MM) ke 5 AIS Forum di Bali-Indonesia pada



tanggal 10 Oktober 2023 yang dihadiri 30 Negara dan 3 Organisasi Internasional menghasilkan kesepakatan disepakati untuk memperkuat komitmen negara pulau dan kepulauan dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama AIS Forum di masa mendatang; **Keempat**, Indonesia sebagai Inisiasi Penyelenggaraan 1st *High Level Meeting* (HLM) AIS Forum di Bali-Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri 32 Negara dan 4 Organisasi Internasional berhasil menghimpun partisipasi dari berbagai stakeholder terutama dari para pemuda pemudi di negara-negara AIS Forum.

4. Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menghasilkan percepatan peresmian operasi PSEL Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2023;
5. SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menghasilkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 dengan realisasi sebesar 64,85, tahun 2021 dengan realisasi sebesar 67,53%, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 70,14 dan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 75,45% atau tingkat akuntabilitas kinerja BB dengan interpretasi Sangat Baik.
6. Capaian Kinerja lainnya: Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang melalui kebijakan kerja sama Selatan-Selatan (KSS) mencapai success story melalui MoU Indonesia, yakni antara lain: MoU antara: 1). Indonesia-Kenya menghasilkan 16 MoU; 2). MoU antara Indonesia-Afrika Selatan menghasilkan 4 MoU; 3). MoU antara Indonesia-Tanzania menghasilkan 7 MoU; 4). MoU antara Indonesia-Mozambik menghasilkan.

4.3. Kendala

Kendala Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan IKU dan capaian kinerja lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kendala pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada tahun 2023 adalah belum maksimalnya tingkat kepatuhan pengumpulan pelaporan dari Masing-masing K/L melalui aplikasi SISMONEV 2.0, serta adanya Perubahan Rencana Kegiatan pada pertengahan tahun 2023;
2. Kendala pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) di tahun 2023 adalah 1). Belum maksimalnya program-program untuk pemberdayaan baik wilayah dan



masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga perlu untuk menyusun program yang membangun serta mengembangkan potensi wilayah dan masyarakat agar WP3K tidak sangat ketergantungan dengan pulau utama; 2). Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar-pulau menghambat respons cepat terhadap bencana dan mempersulit upaya evakuasi, bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut; 3). aspek mahal teknologi dan biaya aplikasi dan pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas teknologi menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya;

3. Kendala pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) di tahun 2023 adalah 1). Berdasarkan hasil mandat dari High-Level Meeting, Pemerintah Indonesia dinilai kurang berinisiasi dengan Sekretariat AIS Forum untuk menyusun rancangan awal roadmap peningkatan kerangka institusional AIS Forum dalam rangka menuju pembentukan organisasi internasional. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai penjur utama AIS Forum di Indonesia agar segera mengoordinasikan berbagai K/L terkait dalam penyusunan dimaksud; 2). Meskipun keterlibatan K/L pada AIS Forum sudah maksimal, namun sangat dibutuhkan keterlibatan potensi peran aktif BUMN pada AIS Forum sangat minim, padahal selain sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia, keterlibatan BUMN bisa membantu mendapatkan pasar baru di berbagai negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia; 3). Melanjutkan komitmen pendanaan Indonesia untuk AIS Forum seperti yang telah disampaikan oleh Presiden pada saat HLM AIS Forum;
4. Kendala pelaksanaan Koordinasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim tahun 2023 adalah 1). Hasil evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan dalam penerapan SMK-3 yang sudah diatur secara jelas oleh PP nomor 50 tahun 2012 pada galangan kapal, menghasilkan bahwa diperlukan perubahan revisi terhadap peraturan tersebut. Hal ini disebabkan industri galangan kapal memiliki tiga jenis yakni, industri galangan kapal kecil, sedang dan menengah; 2). Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Industri Maritim yang diusulkan kementerian perindustrian pada tahun 2023, masih dalam proses persetujuan pada Proklam Legislasi Nasional (Prolegnas), membuat keterlambatan dalam penyempurnaan dokumen SMK-3 pada PP nomor 50 tahun 2012 yang akan direvisi;

- 
5. Kendala pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas tahun 2023 melalui **dua Koordinasi** adalah **Pertama**, Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas adalah 1). Transmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Dumai mengalami kendala pada aspek keekonomian sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi demand; 2). Transmisi Pipa Gas Ruas Sei Mangke-Duma tidak diajukan dalam perencanaan anggaran APBN tahun 2023 pada Kementerian Keuangan; 3). Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon-Semarang: Konstruksi Pipa Cisem Tahap I diharapkan bisa beroperasi secara bertahap pada akhir 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang; 4). Transmisi Pipa Cisem Tahap II yaitu Ruas Batang Cirebon masih membutuhkan kepastian alokasi penganggaran proyek dari APBN oleh Kementerian Keuangan; **Kedua**, Koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas adalah 1). RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi) dan sedang menunggu proses di Sekretariat Negara; 2). Potensi penghasil emisi/emitters dalam dan luar negeri belum terpetakan; 3). Pemetaan potensi storage karbon belum terintegrasi antar K/L dan stakeholder terkait; 4). Belum ada standar penyelenggaraan kegiatan CCS secara nasional, dan direncanakan akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Presiden Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Lampiran, Surat Menko Hal. Arahan Presiden Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon).
 6. Kendala pelaksanaan Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional pada tahun 2023 adalah 1). Ketidakselarasan supply dan demand gas bumi dengan belum terbangunnya integrasi pipa gas transmisi nasional; 2). Peningkatan kebutuhan gas bumi nasional meningkat namun supply gas nasional berkurang dan harga gas semakin meningkat; 3). Peta pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Jaringan Gas memerlukan evaluasi harga yang optimal dan strategi pengembangan infrastruktur massif. Optimasi lokasi, waktu dan harga antara produksi dan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur yg optimal.
 7. Kendala pelaksanaan Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi pada 6 proyek RDMP/GRR/ Petrochemical tahun 2023 antara lain yaitu, 1). RDMP Balikpapan adalah Permohonan import permit baja dan produk turunannya; Permohonan izin pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas pemasangan pipa



unloading 52” pada ruas jalan Kademan-Penajam; Penyesuaian perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) Lawe-lawe ref. UU CK, Percepatan persetujuan Masterlist tahap 2 (PT KPI) dan tahap 3 (PT KPB) dan pembebasan bea masuk; 2). GRR Tuban adalah Pelebaran Jalan dan Penguatan Jembatan Eksisting; Pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Gresik- Lamongan-Babat-Tuban, Reaktivasi infrastruktur railway kereta api dari Babat ke Tuban; Perpanjangan periode pengkreditan VAT Input saat ini 5 tahun menjadi 10 tahun dan Pembebasan VAT untuk seluruh barang modal; Dukungan pemenuhan porsi equity PT. Kilang Pertamina Internasional (KPI) dalam skema kerjasama Proyek Kilang Minyak RI-Rusia (Rosneft) yakni Rosneft menagih pemenuhan porsi equity KPI untuk dapat closing Final Investment Decision (FID) atau keputusan final investasi; 3). RDMP Cilacap adalah Koordinasi untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengelola lahan ex TNI AD; dan Belum didapatkan calon partner; 4). Petrochemical Jawa Barat adalah belum didapatkan calon partner; 5). RDMP dan Green Refinery Plaju adalah belum didapatkan calon partner; belum ada kepastian ketersediaan supply dan infrastruktur bahan baku; Belum ada kepastian pasar untuk domestic market; Relaksasi harga produk/penghapusan pajak BBM; Percepatan pengurusan AMDAL; 6). RDMP Dumai adalah Belum didapatkan calon partner.

8. Kendala pelaksanaan Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tahun 2023, terdapat PSEL pada 10 kota adalah: 1). PSEL DKI Jakarta kendalanya, salah satu wilayah layanan yakni ITF Sunter masih dalam tahap pencarian mitra yang akan bekerjasama dengan BUMD Jakpro; 2). PSEL Tangerang kendalanya proses administrasi pra konstruksi dalam tahap penyelesaian; 3). PSEL Tangerang Selatan kendalanya belum memiliki mitra dan belum melaksanakan; 4). PSEL Bekasi kendalanya belum ditetapkan pemenang lelang; 5). PSEL Jawa Barat kendalanya masih melakukan kajian internal atas permohonan penyesuaian atas pembelian tenaga listrik dan bantuan pendanaan tidak sesuai dengan dokumen awal atau Request for Proposal (RFP); 6). PSEL Semarang kendalanya temuan dari BPK atas dasar Legal Opinion dari Kejari Semarang sehingga harus melakukan lelang ulang proyek PSEL Semarang; 7). PSEL Palembang kendalanya pemenuhan dokumen administratif lainnya sedang dilengkapi untuk dilanjutkan ke proses konstruksi; 8). PSEL Makassar kendalanya proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemenang



lelang dengan Pemkot Makassar masih menunggu proses masa sanggah pasca penetapan pemenang lelang selesai; 9). PSEL Sulawesi Utara kendalanya belum memiliki mitra dan belum melaksanakan lelang/tender; 10). PSEL Bali mengundurkan diri dari PSEL pada Tanggal 16 Juli 2021.

9. Kendala pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2023 adalah 1). Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II harus melakukan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi; 2). Dalam melakukan identifikasi risiko, masing-masing UPR Eselon II merincikan tahapan kegiatan sebagai bagian dari business process yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari tahapan kegiatan dapat dilakukan analisis risiko untuk mendapatkan urutan level risiko dari yang tinggi sampai yang rendah; 3). Dengan teridentifikasinya Level Risiko maka UPR Eselon II memiliki penanganan dan pengendalian yang dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko, sehingga pemantauan dapat dilakukan berkala untuk meminimalisir risiko pada tahun berjalan; 4). Merujuk pada Permenko Marves Nomor 8/2023 pada Form Manajemen Risiko UPR Eselon II lingkup Deputy 1, perlu ditambahkan Analisis Risiko untuk mengetahui selera risiko sebagai bahan evaluasi manajemen risiko.
10. Kendala pelaksanaan Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berdasarkan penilaian inspektorat Kemenko Marves melalui data yang bersumber dari bulan Juni 2022 sampai Juni 2023 adalah 1). Komponen Dokumen Perencanaan Kinerja, yaitu a). telah tersedia namun hal tersebut tidak dapat dipertahankan selama 5 tahun terakhir, b). belum seluruh pegawai di lingkungan Deputy tersebut; 2). Komponen Pengukuran Kinerja, yaitu a). Pengukuran Kinerja belum dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir; b). Belum ada inovatif dalam Pengukuran Kinerja dalam lingkup Deputy tersebut; c). Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment;; 3). Komponen Pelaporan Kinerja, yaitu a). Pelaporan Kinerja belum menggambarkan kinerja organisasi setidaknya dalam 5 tahun terakhir, belum dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu; b). Pelaporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; c). Pelaporan Kinerja belum terdapat upaya inovatif serta layak



menjadi percontohan secara nasional; 4). Komponen Evaluasi Internal, yaitu a). Evaluasi Internal belum dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir; b). Evaluasi Internal belum terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

11. Kendala pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang tahun 2023 adalah 1). Proses negosiasi MoU G-to-G dan B-to-B antara Indonesia dan negara-negara Afrika banyak terhambat karena kebijakan yang telah diambil oleh Pimpinannya tidak terdeliver ke level teknis, sehingga dalam level teknis negosiasi memerlukan waktu yang cukup lama; 2). Konfirmasi penerimaan kehadiran Presiden Republik Indonesia ke negara-negara target sangat lama sehingga, rundown kunjungan baru terselesaikan H-7 hari sebelum pelaksanaan kunjungan; 3). Kunjungan Presiden Republik Indonesia merupakan kunjungan bersejarah, dimana ini merupakan pertama kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke benua tersebut, sehingga beberapa negara mengajukan keinginan agar Presiden Joko Widodo turut hadir di negara-negara Afrika lainnya, namun jadwal yang padat menutup kemungkinan untuk Presiden berkunjung ke negara-negara lainnya; 4). Terdapat beberapa Eselon I Kemenko Marves yang tidak dapat hadir dikarenakan rombongan kenegaraan sudah full, sehingga anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak terpakai.

12. Kendala pelaksanaan Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini tahun 2023 adalah 1). Waktu yang relatif singkat untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kerja sama tersebut. Terlebih pelaksanaan rangkaian kegiatan yang dilakukan bergantung pada turunnya anggaran belanja tambahan yang diajukan dan pelaksanaan kegiatannya diselenggarakan pada triwulan terakhir Tahun Anggaran 2023; 2). Peluang kesempatan peningkatan kerja sama ini merupakan momentum yang sangat baik sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, sehingga dalam mengidentifikasi area kerja sama yang akan dilakukan perlu banyak melibatkan stakeholder terkait dalam diskusi maupun koordinasi-koordinasi yang dilakukan; 3). Dalam proses pelaksanaan MoU antara PLN dan PPL saat ini terkendala dengan proses penyusunan Power Purchase Agreement (PPA) yang belum final. Hal ini dikarenakan belum disepakatinya terkait tarif listrik yang akan diberlakukan. Sehingga terkait izin jual beli tenaga listrik lintas negara, belum dapat ditindaklanjuti prosesnya.



4.4. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan IKU dan capaian kinerja lainnya tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada tahun 2024 adalah melakukan akselerasi oleh masing-masing POKJA internal di Kemenko Marves untuk mendorong K/L untuk memastikan target – target Tahun 2024 dapat selesai di akhir Tahun untuk dilaporkan di B12 pada awal 2025;
2. Tindak Lanjut pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) di tahun 2024 adalah mengidentifikasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk menyusun program berbasis keahlian, peningkatankapasitas baik SDM maupun kelembagaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur strategis dan penunjang untuk memaksimalkan potensi WP3K;
3. Tindak Lanjut pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum) di tahun 2023 adalah 1). Rencana pelaksanaan dua kali Senior Official Meeting (SOM) dan satu kali Ministerial Meeting (MM) AIS Forum di tahun 2024; 2). Penyusunan rancangan roadmap untuk 3 tahun mendatang berfokus untuk persiapan institusional AIS Forum menjadi Organisasi berbasis Traktat/Charter. Dengan 3 aspek utama yakni Dewan Penasehat, *Program and Operation Policy and Procedure* (POPP/SOP), dan Kerangka Kelembagaan; 3). Regulasi Nasional guna mengawal leadership Indonesia untuk menjadikan AIS Forum sebagai Organisasi Internasional; 4). Rencana pembentukan Working Group Nasional dan Working Group AIS Forum untuk strategi nasional dan roadmap AIS Forum; 5). Komitmen pendanaan Pemerintah Indonesia atas kontribusi sukarela non-regular senilai 5 Juta USD yang akan memasuki termin kedua (2024-2025), dan terkait hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah siapkan rencana pencairan anggaran untuk tahun 2024.
4. Tindak Lanjut Koordinasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim tahun 2024 adalah 1). mendorong pengembangan sektor industri perkapalan terutama dalam ketersediaan SDM industri perkapalan yang kompeten sesuai dengan



bidang keahlian; 2) mendorong percepatan pegesahan rancangan PP tentang Industri Maritim; 3). mendorong penyusunan Draf pedoman penerapan SMK-3 pada Industri galangan kapal pada PP nomor 50 tahun 2012.

5. Tindak Lanjut Koordinasi Peningkatan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas tahun 2024 melalui **dua Koordinasi** adalah **Pertama**, Koordinasi Capaian Akhir Pembangunan Pipa Transmisi Gas adalah Inisiasi dan penyelesaian pipa transmisi Cirebon-Semarang, pipa transmisi Dumai-Sei Mangke, dan pipa transmisi WNTS-Pemping; Sedangkan **Kedua**, Koordinasi Penerbitan Regulasi Dalam Rangka Penurunan Emisi GRK Sektor Minyak dan Gas adalah). Mendorong Kementerian ESDM dalam pemetaan penghasil emisi/emitters dalam dan luar negeri; 2). Mendorong Kementerian ESDM dalam penyusunan peta potensi storage karbon untuk industri dalam negeri dan luar negeri melalui skema cross-border; 3). Berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sekretaris Negara dalam penyusunan kebijakan perizinan kegiatan usaha hulu migas melalui percepatan pengesahan rancangan peraturan presiden tentang cadangan penyangga energi dan rancangan peraturan presiden penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; 4). Pembentukan Tim Kerja Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Di Sektor Hulu Migas dalam mendukung penerapan Rancangan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.
6. Tindak Lanjut pelaksanaan Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional pada tahun 2024 adalah 1). Pengembangan dashboard dan database neraca gas nasional; 2). Pembentukan BUMN Petrokimia dan kebijakan sektor swasta petrokimia; 3). Penetapan harga pasar gas bumi dengan pemberian subsidi pada sektor bernilai tambah (methanol, pupuk, ammonia, dan pembangkit listrik); 4). Pemanfaatan advanced technology pada eksploitasi gas konvensional dan pengembangan skema bagi hasil lebih menarik pada gas non-konvensional; 5). Fleksibilitas bentuk kontrak kerja sama, perbaikan T&C pada penawaran Wilayah Kerja, pemberian fasilitas perpajakan dan rumusan insentif untuk mendorong iklim investasi di hulu; 6). Pengembangan infrastruktur dan perhitungan harga optimum implementasi Jargas, konversi sumber energi lain menjadi gas di sektor emisi tinggi, dan pengembangan kawasan industri berbasis gas bumi; 7). Penciptaan industri hilir baru dan diversifikasi badan usaha; 8). Alokasi kargo LNG Bontang dan Tangguh untuk mitigasi kekurangan pasokan gas bumi; 9). Optional untuk



evaluasi pengalihan alokasi ekspor gas bumi secara bertahap dengan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik.

7. Tindak Lanjut pelaksanaan Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi pada 6 proyek RDMP/GRR/ Petrochemical tahun 2024 antara lain yaitu 1). RDMP Balikpapan adalah dukungan bimbingan teknis untuk prosedur pelaporan SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional); Percepatan penerbitan import permit barang modal/material proyek; Percepatan persetujuan KKPR Lawe-lawe; Percepatan persetujuan masterlist dan pembebasan bea masuk oleh Kemenperin dan Kemeninvest; 2). GRR Tuban adalah Dukunan Ditjen Bina Marga PUPR terkait usulan pelebaran jalan dan penguatan jembatan eksisting; Butuh persetujuan Ditjen PI Kemenkeu dan Ditjen Bina Marga PUPR untuk percepatan pembangunan Tol Demak-Tuban dan Tol Gresik-Lamongan-Babat-Tuban; Mendorong persetujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub reaktivasi infrastruktur railway kereta api dari Babat ke Tuban; Perpanjangan periode pengkreditan Value Added Tax (VAT) Input saat ini 6 tahun menjadi 10 tahun serta pembebasan VAT untuk seluruh barang modal; Dukungan pinjaman/opsi pendanaan bagi PT KPI/Pertamina; 3). RDMP Cilacap adalah Dukungan pengkoordinasian dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN) Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional untuk pelaksanaan proses ganti rugi pengalihan pengelola lahan ex TNI AD; Dukungan untuk pencarian partner; 4). Petrochemical Jawa Barat adalah Dikarenakan Partner Downstream/pengolah bahan mentah minyak atau gas bumi menjadi bahan jadi adalah LG Chem namun sudah mengundurkan diri dari kerjasama, maka saat ini sedang dijangkau 4 Company yang akan di approach yaitu INEOS, GS Global, UBE Tech, dan Shell; Dukungan untuk pencarian partner; 5). RDMP dan Green Refinery Plaju adalah Dukungan untuk pencarian partner; Kejelasan supply bahan baku melalui Domestic Market Obligation (DMO); Dukungan untuk penjajakan dengan beberapa perusahaan penerima/trader; Kepastian mandate terkait kebijakan beyond B30; Arahan dari KLHK terkait dokumen-dokumen kelengkapan AMDAL/ Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL); 6). RDMP Dumai adalah Dukungan untuk pencarian partner.
8. Tindak Lanjut Kendala pelaksanaan Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tahun 2024, adalah dengan



memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki mitra, proses lelang, penetapan mitra, maupun yang sudah memiliki mitra mengingat PSEL merupakan PSN sehingga harus segera diselesaikan. Percepatan tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi intens dengan K/L maupun badan usaha yang menjadi kendala serta menetapkan target penyelesaian setidaknya untuk masuk dalam tahap konstruksi.

9. Tindak Lanjut pelaksanaan PMRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 adalah melaksanakan Road Map RB Tematik tahun 2020–2024 melalui 3 tema, yakni Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden.
10. Tindak Lanjut pelaksanaan Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun 2024 adalah 1). Seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merumuskan dan menetapkan SKP rencana tahun 2024 selanjutnya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; 2). Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment (dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan); 3). Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja (output) serta dituangkan dalam laporan kinerja; 4). Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan melakukan upaya inovatif dalam Perencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja, serta diterapkan secara berkelanjutan.
11. Tindak lanjut Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang adalah, 1). Kemenko Marves akan memperluas kehadiran Indonesia di negara-negara berkembang di seluruh dunia, dan mendorong untuk terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan; 2). Kerja sama yang diharapkan bukan hanya perdagangan, namun sebagai upaya penguatan posture Indonesia, maka dalam agenda ini kami mendorong agar perusahaan Indonesia (BUMN/Swasta) dapat berinvestasi di Afrika dan juga merencanakan untuk memberikan capacity building di beberapa negara-negara Afrika yang ditargetkan.
12. Tindak Lanjut pelaksanaan Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini adalah 1). Produk minerba di Indonesia akan dilakukan akselerasi standar nasional sehingga dapat semakin meningkatkan daya tarik investor ke Indonesia. Selain itu Pemerintah Papua Nugini sedang bersiap



untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus untuk hilirisasi nikel dengan mengadopsi atau menjadikan regulasi yang berlaku di Indonesia sebagai referensi; 2). Pemerintah Papua Nugini yang direncanakan diwakili oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Menteri Investasi, akan melakukan kunjungan (lapangan) ke Indonesia. Selain smelter PT. IMIP di Morowali, PT Weda Bay menjadi salah satu request lokasi tambahan dari Pemerintah Papua Nugini; 3). Kesepakatan tarif listrik yang berpedoman pada PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara agar segera diselesaikan dan Kemenko Marves segera mengoordinasikan terkait akselerasi penugasan PLN dari Kementerian ESDM dan BUMN sebagai legal aspect dari jual beli tenaga listrik ke Papua Nugini; 4). Mendorong perbaikan draft MoU dari pihak Papua Nugini terkait *Border Land Transport* yang termasuk didalamnya kendaraan biasa, kendaraan diplomatik, dan lainnya termasuk dalam MoU tersebut.

LAMPIRAN

Data dukung Laporan Kinerja dapat diakses melalui link:
<https://s.id/lapkinD12023>

No	Uraian	Penjelasan Untuk Halaman
1	Laporan Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Periode Desember 2023	12
2	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023	24
3	Buku Manual: Indeks Kepemimpinan Maritim	25
4	Manual IKU Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023	25
5	Laporan Hasil Perhitungan Indeks Kepemimpinan Maritim tahun 2023	30
6	Laporan Ringkasan Kebijakan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 dalam rangka pelaksanaan	47
7	Laporan Ringkasan Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	49
8	Laporan Ringkasan Kebijakan Peningkatan Kerja Sama Internasional Antar Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum)	50
9	Laporan Ringkasan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Maritim	54
10	Laporan Ringkasan Kebijakan Pencapaian Produksi Minyak dan Gas	57
11	Laporan Koordinasi Rancangan Desain Besar Pemanfaatan Gas Nasional	61
12	Laporan Koordinasi Major Project Pembangunan Kilang Minyak Bumi	63
13	Laporan Koordinasi Major Project Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	66
14	Laporan RB Tematik untuk penilaian Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023	70
15	Laporan AKIP untuk Penilaian Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023	73
16	Laporan Koordinasi Peningkatan Kerja Sama Negara-Negara Berkembang	76
17	Laporan Koordinasi Percepatan Implementasi Kerja Sama Republik Indonesia dan Papua Nugini	80
18	Data Pendukung adanya Anggaran Tambahan Untuk Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2023	79 dan 88